

**STRATEGI KOMUNIKASI POLISI RESORT KOTA PALEMBANG DALAM
MENANGKAL GERAKAN TERORISME DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos)
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam**

Disusun Oleh:

KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG

NIM: 10510019

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

NOTA PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, pemeriksaan dan perbaikan. Bahwa skripsi saudara **Khairil Anwar Simatupang** NIM: **10510019** yang berjudul "**Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang**". Sudah dapat diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 April 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hamidah, M.Ag
NIP. 196610011991032001

Mohd. Aji Isnaini, M.A
NIP. 197004172003121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sebaik-baik diriku masih lebih baik orang lain, dan Seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diriku.

Belajar, Berjuang, Serta Bertaqwa.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukurku kepada Allah SWT, karena rahmad dan kasih sayangmu yang telah memberikanku kekuatan, kesabaran dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

**Kedua Orang Tuaku Ibu dan Bapak, Ayundaku serta Kedua Adikku Alfian
Simatupang dan Adhy Juniarsyah Simatupang.**

**Semoga Ini Bukanlah Kebanggaan Terakhir Yang Kuberikan Untuk Kalian
Dan Almamaterku Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran
Islam UIN Raden Fatah Palembang.**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : 10510019

NAMA : KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG

FAK/ JUR : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan skripsi saya ini hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

Palembang, 18 April 2017

Yang Menyatakan,

Khairil Anwar Simatupang

NIM. 10510019

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, pertolongan, kekuatan serta kesabaran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta Salam tetap tucurahkan kepada suri tauladan Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat serta keluarga beliau, yang telah membawa islam kepada masa kejayaan yang telah kita nikamati seperti saat ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pada skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti sadar betul bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan inilah peneliti ingin menyampaikan rasa Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Sirozi, Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang

2. Bapak Dr. Kusnadi MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh dosen yang ada, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk belajar dan mengembangkan ilmu seluas-luasnya selama di perkuliahan
3. Ibu Dr. Hamidah, M.Ag dan bapak Aji Isnaini selaku dosen pembimbing yang telah dengan ikhlas mencurahkan waktu, dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuk dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
4. IPDA Agus Saputra selaku Kbo, Brig Ramon Darman, Brig Rahmat Abimanyu dan seluruh pihak yang telah membantu, memberikan data, serta informasinya selama peneliti melakukan penelitian di Satlantas Polresta Palembang
5. Kedua orang tuaku, Bapak Abdul Kadir Jaelani dan Ibu Surati yang telah memberikan semangat, motivasi, do'a, kasih sayang, perhatian, nasehat dan seluruhnya. Terima Kasih Atas Segalanya Ibu Bapak.
6. Adik-adikku yang teramat kusayangi, Dalu Rama Prasetyo dan Imam Tri Putro Jumentoro. Yang telah memberi semangat dan celotehan motivasi kepada mbakmu.
7. *My ever after best friend*, My Patrick 'Helwa Septi Tricahyani' and My Squity 'Miranda Uju Lestari' terima kasih atas bantuan, semangat, kekompakkan, kekonyolan, keunikkan, dan keceriaan yang telah kalian berikan padaku dan maaf karena selalu merepotkan kalian. Semoga kedekatan dan keakraban kita bisa terus sampai akhir usia.. *keep happy guys, Love youu*

8. Teman seangkatanku KPI 2012, PPL KPI dan KPI. B, terima kasih atas kekompakkannya, serunya, dan semua kenangan manisnya selama kita berjuang bersama di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang
9. Teman KKN 113, terima kasih atas kekompakkan kita menjalani dan melewati hari demi hari di desa orang. Demi tanggung jawab sebagai sarjana.

Terakhir yang bisa peneliti ucapkan semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kebaikan yang telah mereka berikan kepada peneliti. Dengan limpahan pahala yang berlipat ganda *Amiin ya rabbal 'alamin* dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua.

Palembang, 2017

Penyusun

Khairil Anwar Simatupang
Nim. 10510019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Kegunaan Penelitian.....	8
Tinjauan Pustaka	9
Kerangka Teori	11
Metodologi Penelitian	17
Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

Strategi Komunikasi	24
Tahapan-tahapan Strategi Komunikasi.....	25
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Strategi Komunikasi..	27
Tekhnik-tekhnik dan Proses Dalam Penyusunan Strategi Komunikasi..	31
Pengertian dan Ciri-ciri Terorisme.....	38
Sejarah Dan Pemicu Munculnya Terorisme	41

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

Sejarah Singkat Polresta Palembang	50
Tugas Pokok Kepolisian	51
Visi dan Misi.....	53
Pelaksanaan Fungsi Polresta	55
Daftar Nama Staf/Pejabat di Polresta Palembang	56
Struktur Organisasi Polresta Palembang	65
Deskripsi Susunan Organisasi Polresta Palembang	66
Deskripsi Satintelkam Polresta Palembang	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang	90
Pengetahuan Situasional	92
Penentuan Tujuan	94

Kompetensi Komunikasi.....	97
Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang	110

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	114
Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan oleh Satintelkam Polresta Kota Palembang dalam menangkal gerakan terorisme di kota Palembang. Dipilihnya Polresta Kota Palembang sebagai subjek tempat penelitian, karena lembaga ini merupakan lembaga hukum yang menjalankan dan mengatur undang-undang terorisme dan sudah pasti kesehariannya berhadapan langsung dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan komunikasi terkait dengan bahaya terorisme agar dapat berjalan baik maka diperlukannya suatu strategi sehingga pelaksanaan kegiatan komunikasi akan lebih terarah. Maka dari itu skripsi yang peneliti buat dengan judul **“Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang”**. Terdapat rumusan dari masalah ini yakni yang pertama Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang dalam menangkal gerakan terorisme, serta Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, informan primer dalam penelitian ini ialah pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang. Sedangkan informan sekundernya ialah masyarakat Kota Palembang yang bermukim di beberapa daerah atau kecamatan. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode analisis studi deskriptif yakni, mendeskripsikan data yang didapat melalui realita dan fenomena yang sebenarnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Satintelkam Polresta Kota Palembang serta penghambat dan pendukungnya.

Seiring dengan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian skripsi ini, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dalam menangkal gerakan terorisme yang dilakukan pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang berdasarkan indikator-indikator penilaian pengetahuan situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi secara keseluruhan telah berjalan baik. Akan tetapi adapun faktor penghambat dalam komunikasi tersebut ialah ‘manusia’ sebagai penerima informasi/pesan yang terkadang terjadi salah pengertian, alim ulama tersebut terlalu menutup diri, dan komunikasi tersebut merasa dicurigai sebagai bagian dari terorisme.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu komunikasi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner sehingga definisi komunikasi pun menjadi banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya berbagai definisi komunikasi yang ada sesungguhnya saling melengkapi dan menyempurnakan sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri.

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari. Bisa dipastikan sebagian besar dari kegiatan kehidupan kita menggunakan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal.

Pada dasarnya komunikasi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: sudut bahasa (Etimologi), dan dari sudut istilah (Terminologi)¹. Menurut pakar komunikasi Onong Uchjana mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh

¹ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007). Cet. ke-1. hlm. 19

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media.²

Salah satu dari kegunaan komunikasi ini adalah bisa dimanfaatkan dalam proses pencegahan, penangkalan bahkan pemberantasan terorisme, karena Akhir-akhir ini rangkaian serangan terorisme marak terjadi. Wilayah dan target terorisme di Indonesia saat ini sudah meluas kepada bukan hanya kepentingan *domestic* tetapi juga kepentingan Internasional.

Bahkan kepentingan Indonesia di luar negeri sudah menjadi sasaran terorisme dengan di bomnya Kedutaan Besar Indonesia di Prancis pada tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan semakin meningkat intensitas dan frekuensinya. Semakin maju pengetahuan pelaku dan semakin modern teknologi yang digunakan, semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap pelakunya

Mengungkap dan mendeteksi secara dini aksi terorisme melalui kegiatan Intelejensi, beroperasi jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme Internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat keamanan di Indonesia.³

Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen, menyebabkan penanganan terhadap masalah terorisme tidak optimal, membutuhkan kualitas dan

² Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). Cet. ke-7. hlm. 5

³ Undang-undang tindak pidana terorisme No. 15 tahun 2003 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

kapasitas Intelejen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif di balik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan terorisme di suatu Negara umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun bersifat Internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas Nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana

terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Untuk itulah, kiranya kita perlu mencermati Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disatu sisi, umat Islam sebagai umat terbesar di negeri ini harus dapat menggunakan hak-haknya untuk melaksanakan ajaran agamanya dan disisi lain, upaya tersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan dimana sesamekelompok Islam malah saling berbenturan satu sama lain yang akan menjadi lahan yang rawan bagi tumbuhnya terorisme⁴.

Kita harus dapat menunjukan pada dunia bahwa perbuatan-perbuatan konkret di masyarakat yang membuktikan bahwa Islam bukan agama terorisme bahkan anti terhadap terorisme. Kita tak perlu khawatir dengan keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berupaya menanggulangi dan membatasi terorisme. Justru kita harus dapat memberikan dukungan agar Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berkaitan dengan terorisme memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi umat Islam, dapat melindungi kegiatan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya dan dapat menangkal tudingan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Islam adalah suatu bentuk terorisme. Untuk itu yang diperlukan adalah langkah-langkah konkret ditengah masyarakat berupa keteladanan sehingga

⁴ *Ibid, hlm. 65*

kalangan non Islam pun sebagai sesama warga bangsa Indonesia, akan lebih *respect* kepada kita.

Demikian juga dunia internasional, kita tidak mau demi kepentingan globalisasi kapitalisme internasional yang dipelopori AS dijadikan bulan-bulanan dan sasaran mereka dengan memojokan umat islam melalui stigmatisasi sebagai teroris. Padahal tujuan mereka adalah sebagaimana agar dunia Islam berada di bawah kendalinya, terutama melalui kekuatan mereka di bidang ekonomi, politik dan militer.⁵

Jika terorisme ditinjau dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam hal itu termasuk *jarīmah hirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kapak yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya peledakan bom, semua itu akan terkena delik *hirābah*.

Melihat hasil *ijtima'* ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarīmah hirābah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. al-Māidah ayat: 33. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI tersebut ialah:⁶

⁵ Asshiddiqie, *Perlu Antiterorisme Tak Hanya Untuk Umat Islam, ed.1*,(Jakarta:Salemba, 2009), hlm. 23.

⁶ <http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html>.akses pada tanggal 23Februari 2016

1. Sifatnya merusak (*ifsād*)
2. Tujuan untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain.
3. Dilakukan tanpa aturan.

Dan sekali lagi, umat Islam tak perlu mengkhawatirkan lahirnya peraturan peraturan tersebut, karena sejak semula Islam berada pada posisi menentang terorisme. Bahwa bila di kemudian hari terbukti dan sah secara hukum ada sekelompok orang yang menamai mereka dengan umat Islam yang menjadi teroris, maka harus ditindak tegas agar tidak mencemarkan nama baik agama Islam. Kita justru harus ikut menghukumnya. Bukan malah menutup nutupinya. Kita justru harus bisa ikut menangkapnya, bukan malah melindunginya.⁷

Dalam upaya pembuktian, Pemerintah RI sebagai suatu penguasa mempunyai kedaulatan penuh negaranya, tak bisa didikte oleh penguasa negara lain, khususnya negara-negara yang memojokan keberadaan umat Islam di Indonesia, masalah terorisme, bukan suatu misi keagamaan. Adanya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak sekali respon dari masyarakat.

Oleh karena itu dengan semakin maraknya aktivitas-aktivitas terorisme, sudah saatnya melakukan penangkalan gerakan terorisme dengan menjalin komunikasi yang baik dan efektif, karena ini bisa menjadi salah satu strategi yang sangat tepat dalam

⁷ Eep Syaifullah Fatah, *Mengenang Perpu Anti Terorisme, et al* (Jakarta:Rajawali, 2003), hlm.23

pengecegan bahkan pemberantasan terorisme di Indonesia. Polisi Resort Kota Palembang adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menangani permasalahan teroris di Sumatera Selatan. Dalam mengatasi dan mencegah tindakan terorisme Polisi Resort Kota Palembang melakukan berbagai cara agar masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan perihal tersebut diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang *Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang*.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Polisi Daerah Sumatera Selatan Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi akademis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis

Untuk pengembangan komunikasi penyiaran islam, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan peningkatan wawasan akademis terutama dalam menemukan strategi komunikasi untuk menangkal gerakan terorisme

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan terorisme dimasa yang akan datang.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada Negara terhadap penangkalan Gerakan terorisme dan bagi khasanah keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam yang berkaitan dengan strategi komunikasi di markas Polisi Resort Kota Palembang

E. Tinjauan Pustaka

Terorisme saat ini menjadi isu yang aktual untuk dibicarakan, Negara Indonesia dengan kompleksitas etnis, suku dan agama tentunya mengundang berbagai problem di berbagai lini kehidupan masyarakat. Mengingat kemajuan dan perkembangan daripada suatu disiplin ilmu pengetahuan yang tidaklah murni sendiri, akan tetapi merupakan perkembangan ataupun komparasi dari ilmu-ilmu sebelumnya, baik dari segi metoda maupun disiplin ilmu yang ditelitinya, maka untuk menghindari kesamaan dan tindak plagiat terhadap hasil ilmu penelitian, dibawah ini peneliti perlu menuliskan beberapa hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Sejauh penelusuran dan tela'ah pustaka yang telah penyusun telusuri, sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang penanganan terorisme oleh Polisi Resort Kota Palembang, Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut, di antaranya:

Strategi komunikasi pada Polisi Resort Kota Palembang, dalam Penangkalan Gerakan Terorisme, sangat menarik untuk di bahas lebih lanjut. Terutama usaha Polisi Resort Kota Palembang dalam merancang strategi komunikasi yang efektif untuk menangkal gerakan terorisme di Kota Palembang.

Dalam merealisasikan strategi komunikasi efektif yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Palembang berbagai perpaduan strategi komunikasi yang efektif mampu mereka lakukan. Salah satu strategi komunikasi yang mereka gunakan adalah memadukan metode komunikasi persuasif dan informatif⁸.

Sedangkan karya tulis dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan, yaitu skripsi saudari Lili Evelin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi Tentang Kebijakan Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*"⁹, skripsi ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya aksi terorisme di Indonesia, kebijakan kriminalisasi tindak pidana terorisme dan membahas tentang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

⁸ Anwar Arifin, *strategi komunikasi, sebuah pengantar ringkas*, Bandung: Armico, 1994), hlm 75-76

⁹ Lili Evelin, "*Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kebijakan dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*", Fakultas Hukum UII (Yogyakarta 2003).

Kemudian skripsi Achmad Fathoni "*Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*"¹⁰, skripsi ini membahas tentang bagaimana hukuman bagi para pelaku tindak pidana terorisme, melalui studi undang-undang nomor 15 tahun 2003, dan bagaimana Islam menyikapinya.

Dengan kemampuan memadukan strategi komunikasi persuasif dan informatif inilah, Polisi Daerah Sumatera Selatan mampu memberikan pengaruhnya terhadap terorisme. Hal ini, Polisi Daerah Sumatera Selatan sebagai Lembaga Pertahanan Pemerintah, telah mampu menjadikan masyarakat merasa aman terhadap guncangan serangan-serangan ataupun aksi teror yang dilakukan oleh teroris.

F. Kerangka Teori

1. Konsepsi tentang Strategi Komunikasi Dakwah

a. Strategi

Menurut Nickols, konsep tentang strategi pada dasarnya berasal dari kalangan militer yang diadaptasi kedalam dunia bisnis "*the concept of strategy has been borrowed from the millitary and adapted for use in business*"¹¹. Dan kini, konsep strategi tidak hanya digunakan dalam bidang militer dan bisnis, tetapi juga dalam bidang non bisnis seperti dalam ilmu komunikasi.

¹⁰ Achmad fathoni, "*Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹¹ http://home~att.net/~Nikols/strategi_defenition.

Mintzberg¹² berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan empat hal:

1. *Strategy as a plan*, yaitu strategi merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman bagi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditekankan.
2. *Strategy as a pattern*, yaitu strategi merupakan pola tindakan konsisten yang dijalankan organisasi dalam jangka waktu lama.
3. *Strategy as position*, yaitu strategi merupakan cara organisasi dalam menempatkan produk atau jasa tertentu dalam pasar yang spesifik.
4. *Strategy as a perspective*, yaitu strategi merupakan cara pandang organisasi dalam menjalankan kebijakan. Cara pandang ini berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.

Sedangkan berkaitan dengan dakwah, strategi berarti kepiawian.

b. Strategi Komunikasi

Dalam konteks komunikasi, Arifin¹³ menyatakan strategi diperlukan untuk mendukung kekuatan pesan agar mampu mengungguli semua kekuatan pesan yang ada, khususnya dalam menciptakan efektifitas komunikasi. Menurut Mulyana¹⁴ komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi).

¹² Mintzberg, H & Quinn, the strategy; process, concept, contents, cases, second edition, New Jersey: Prentice hall, Inc, 1991, hlm, 23-28.

¹³ Anwar Arifin, Opcit, hlm, 59.

¹⁴ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2002, hal, 107

Dalam merumuskan strategi komunikasi, Arifin¹⁵ berpendapat bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan. *Pertama*, pengenalan khalayak. *Kedua*, penyusunan pesan. *Ketiga*, menetapkan metode. *Keempat*, penetapan media. *Kelima*, peranan komunikator.

Selain dari kelima faktor di atas, Untuk lebih lanjut memahami keseluruhan faktor strategi komunikasi, penjelasan dari setiap faktor yang ada menjadi sangat penting untuk kita ketahui.

1. Mengenal Khalayak

Khalayak haruslah merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat, dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja saling berhubungan, tetapi juga saling mempengaruhi.

Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak, mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi tak mungkin berlangsung. Justru itu, untuk berlangsungnya suatu komunikasi dan tercapainya hasil yang positif, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metode dan media.

¹⁵ Anwar Arifin, Opcit, hlm, 59.

Untuk menciptakan persamaan kepentingan tersebut, maka komunikator harus mengerti dan memahami kerangka pengalaman dan kerangka referensi khalayak secara tepat dan seksama yang meliputi:

- a) Kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak
- b) Pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma kelompok yang ada.
- c) Situasi dimana khalayak itu berada

2. Menyusun Pesan

Menyusun pesan, berarti menentukan tema dan materi. Dan syarakat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu membangkitkan perhatian. Pada dasarnya setiap individu dalam waktu bersamaan, kadang-kadang dirangsang oleh banyak pesan dari berbagai sumber. Tetapi, tidaklah semua rangsangan itu dapat mempengaruhi khalayak, justru karena tidak semuanya dapat diproses menjadi milik rohani. Sesuatu yang menjadi milik rohani, haruslah terlebih dahulu melalui pintu perhatian, setelah melewati panca indera dan menjadi pengamatan.

Dengan demikian, awal dari suatu efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan, dalam permasalahan ini, Wilbur Schramm mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya pesan tersebut sebagai berikut.

- a) Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju.
- b) Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian itu bertemu.
- c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan itu.
- d) Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana kesadaran pada saat digerakkan untuk memberikan jawaban yang dikehendaki.

3. Menetapkan Metode

Menurut Arifin¹⁶, dalam mencapai efektifitas dari suatu komunikasi, selain tentunya dari kemantapan isi pesan yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi penyampaiannya pesan oleh komunikator kepada komunikan.

Dalam dunia komunikasi, pada metode penyampaian itu dapat dilihat dari dua aspek. yaitu: menurut cara pelaksanaannya, dan menurut bentuk isinya.

4. Pemilihan media

¹⁶ Anwar Arifin, *Opcit*, hlm.73-77

Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, pemilihan media memiliki peran penting. Menurut Jalaluddin Rahmat, yang mengutip pandangan Elizabeth Noell Neuman bahwa ada empat ciri pokok dalam berkomunikasi melalui media. Terutama bagi media massa.

- a) Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis.
- b) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara para peserta komunikasi.
- c) Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang terbatas dan anonim.
- d) Mempunyai publik yang secara geografis tersebar¹⁷.

5. Peranan Komunikator.

Menurut Arifin¹⁸, Dalam proses komunikasi antara komunikator dan komunikan, peran komunikator sangat menentukan bagi diterimanya pesan yang disampaikan khalayak. Berkaitan dengan kontekstualisasi peran komunikator dalam dunia jurnalistik, K.H. Zainal Arifin Thoha menguraikan ke-empat sifat yang harus dimiliki seorang da'i (komunikator)

- a) *Shiddiq*, yakni menjadikan kejujuran diri, sumber tulisan atau referensi, sumber pemberitaan atau fenomena sebagai prasarat yang harus dimiliki aktivis dakwah

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi komunikasi Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 189.

¹⁸ Anwar Arifin, *Opcit*, hlm, 88.

- b) *Amanah*, yakni memiliki rasa tanggung jawab; terhadap dirinya, terhadap Allah, dan terhadap masyarakat.
- c) *Tabligh*, yakni etos penyampaian kebenaran dengan benar (al-haq-bil-haq). Mengingat, kebenaran akan betul-berimplikasi secara benar, apabila kita sampaikan secara benar. Dalam ilmu komunikasi modern, hal ini disebut dengan “komunikasi efektif”, yakni efektif dalam bahasa, efektif dalam isi, efektif dalam sasaran, serta efektif dalam mencapai tujuan.
- d) *Fathanah*, yakni memiliki kecerdasan yang signifikan, terutama dalam jurnalistik. Dalam fathanah, pertama-tama Yang diperlukan adalah daya kritis, yakni kritis dalam memilih dan memilah, serta kritis dalam mengolah serta menyampaikan pesan sehingga tepat sasaran¹⁹.

c. Pengawasan

Menurut *kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)* pengawasan adalah penilikan dan penjagaan..²⁰ Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap individu atau organisasi yang mempunyai tugas dalam pengawasan suatu kegiatan harus mempunyai rencana untuk mengapai tujuan yang telah ditetapkan.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Data

¹⁹ H. Zainal Arifin Thoha, *Aku Menulis Maka Aku Ada, Kutub, Yogyakarta, 2005, hal.117-120*

²⁰<http://kbbi.web.id/tentang-pengawasan> (diakses pada tanggal Mei 26 2016)

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di Polisi Resort Kota Palembang. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. hal ini terinspirasi dari apa yang oleh Koenjaroningrat bahwa sehubungan dengan upaya ilmiah atau penelitian maka diperlukan tata cara kerja yang dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian.²¹

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis akan menggambarkan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dari objek penelitian ini. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²² Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis, artinya serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan dan tentu hingga dapat diulangi kembali oleh

²¹ Koencoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1973), hlm. 215.

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 55

peneliti lain.²³ Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung yang juga seorang peneliti memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan sebenarnya.²⁴ Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan observasi partisipan artinya bahwa peneliti merupakan kelompok yang ditelitinya.²⁵

Dalam hal ini penulis menggunakan observasi partisipan (*Partisipant Observation*) yaitu dengan terlibat langsung secara interatif dalam obyek yang diteliti. Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung. Metode ini juga dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran umum secara menyeluruh mengenai keadaan lokasi, situasi dan kondisi yang sebenarnya serta untuk mengetahui komunikasi interpersonal dan pembinaan perilaku sosial di lokasi.

2. Wawancara mendalam (*Depth Interview*), yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.²⁶ Sementara teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Dengan tehnik ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara

²³ S. Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 145

²⁴ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 125

²⁵ S.Nasution, *Op.Cit*, hlm. 146

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 64

langsung antara pewawancara pedoman wawancara dengan orang yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan pertanyaan.²⁷

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan wawancara berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang setelah sebelumnya disusun. Wawancara dengan model ini dilakukan agar pertanyaan tidak keluar dari lingkup penelitian sehingga informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua model wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepala Polisi Resort Kota Palembang, anggota dan pimpinan yang membidangi tentang penanganan terorisme dan masyarakat yang pernah terlibat dalam aksi terorisme tersebut.

c. Subjek Penelitian dan Batasan Masalah

Subjek Penelitian adalah sumber terutama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti²⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Intelkam Polisi Resort Kota Palembang dalam upaya untuk menangkal gerakan terorisme di kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

²⁷ M. Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonom, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), hlm. 108

²⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau informan²⁹.

d. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok, yang bersumber dari Polisi Resort Kota Palembang, terpidana teroris atau mantan pelaku teroris, serta foto-foto dokumentasi. Sedangkan data sekundernya adalah data penunjang yang dapat memenuhi kriteria tentang terorisme, yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berbagi menjadi dua yaitu:

Adapun subyek yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berbagi menjadi dua yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah sumber yang memberikan informasi-insformasi penunjang bagi kesempurnaan penelitian ini. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Polisi Resort Kota Palembang atau KASAT yang berhubungan dengan penanganan terorisme sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang awal mula berdirinya Polisi Resort Kota Palembang tersebut secara keseluruhan dan gambaran umum tentang Polisi Daerah Sumatera Selatan.

2. Informan Pelengkap

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 7.

Informan pelengkap adalah seseorang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang fokus tentang penelitian guna melengkapi informasi dari informasi kunci. Adapun pelengkap adalah seseorang yang mencakup:

Intelkam dan anggota Kepolisian Resort Kota Palembang dan struktur pejabat Kepolisian Resort Kota Palembang.tersebut. Adapun yang menjadi obyek ini adalah Polisi Resort Kota Palembang sebagai media penerapan komunikasi untuk menangkal gerakan terorisme.

e. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan kualitatif, maka tehnik analisa yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Analisa data adalah proses penyerahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Tujuan analisis dalam penelitian-penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan tersusun rapi. Proses analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam proyek penelitian.³¹

H. Sistematika Pembahasan

³⁰ Masri Singaimbun dan Sofyan Effendi (Ed), *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta: LP3S, 1998), hal. 265

³¹ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Hanindita, 1997), hlm. 87

Untuk lebih mempermudah pembahasan, penulisan, membagi permasalahan dalam skripsi ini menjadi empat bab, dengan sistematika permasalahan dalam skripsi sebagai berikut:

- BAB I berisi pendahuluan yang berisi: gagasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.
- BAB II membahas tentang landasan teori yang terdiri atas Pengertian strategi komunikasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan strategi komunikasi, tehnik-tehnik dan proses dalam penyusunan strategi komunikasi, Pengertian dan ciri-ciri terorisme, Sejarah dan pemicu munculnya terorisme.
- BAB III Sejarah berdirinya Polisi Resort Kota Palembang, Visi, Misi, Program Kerja, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Kondisi Obyektif anggota Kepolisian Resort Kota Palembang .
- BAB IV studi analisis tentang strategi komunikasi Polisi Resort Kota Palembang dalam menangkal gerakan terorisme.
- BAB V merupakan isi pokok dan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Komunikasi

Pengertian Strategi Komunikasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”³²

Menurut pakar komunikasi Onong Uchjana Effendy, mengatakan bahwa: “strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.”³³

Demikian pula pada strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planing*) dan manajemen (*managemen communication*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Jadi, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092

³³ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Terori dan praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Cet, ke-21. hlm. 32

menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

B. Tahapan-tahapan Strategi Komunikasi

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dalam proses strategi komunikasi terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam prosesnya, di antaranya yaitu :

a. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi, konseptor harus mempertimbangkan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menenetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan, “Perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan itu.”³⁴

b. Implementasi strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahapan pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja

³⁴ Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies-CSIS,1978). hlm. 8

sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi, “Dalam pelaksanaan strategi yang tidak menerapkan komitmen dan kerja sama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi.”³⁵

c. Evaluasi Strategi.

Tahap akhir dari menyusun strategi adalah “evaluasi implementasi strategi, evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai, dan dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolok ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk menentukan sasaran yang dinyatakan telah tercapai”³⁶

Ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:

1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.

Adanya perubahan yang ada akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begitupun dengan faktor internal yang di antaranya strategi tidak efektif atau hasil implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai.

³⁵ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prehalindo, 2002). hlm. 3

³⁶ *Ibid.* hlm. 3

- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus mudah diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting dari pada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi.
- 3) Mengembalikan tindakan *korektif* untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti yang ada ditinggalkan atau merumuskan strategi baru. Tindakan korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan hasil yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan.³⁷

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Strategi Komunikasi

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarnya akan cenderung ditentukan oleh dinamika organisasi yang bersangkutan. Dinamika yang tercipta dalam sebuah organisasi tersebut sejatinya disebabkan oleh adanya interaksi yang terjadi baik antara organisasi dengan lingkungannya, maupun satuan-satuan kerja dalam organisasi tersebut. Pada gilirannya interaksi yang terjadi merupakan suatu akibat dan bukan merupakan tuntutan dari

³⁷ *Ibid.* hlm.3

interdependensi yang terdapat antara organisasi dengan lingkungannya dan antara berbagai sub sistem dalam organisasi atau lembaga.

Dinamika yang mutlak terjadi dalam organisasi, mendorongnya untuk meningkatkan kemampuan dalam perumusan strategi yang diterapkan. Pada titik tertentu dinamika itulah yang akan mempengaruhi dalam proses penyusunan strategi komunikasi. Hal ini penting diketahui dan dipahami oleh suatu organisasi, dikarenakan dinamika perkembangan zaman yang terus berubah pada setiap lini kehidupan telah mendorong perubahan pula dalam penetapan strategi.

Bila kita cermati terdapat beberapa faktor yang turut berpengaruh dalam penyusunan strategi komunikasi. Di antara faktor-faktor yang turut andil dalam mempengaruhi penentuan strategi adalah faktor lingkungan, baik itu yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri (*internal factor*) ataupun faktor lain yang berasal dari lingkungan luar organisasi (*eksternal factor*).

Dalam bukunya Prof. Sondang, P Siagian mensinyalir setidaknya terdapat empat faktor dalam menentukan strategi yaitu:³⁸

a. Faktor ekonomi

Tidak hanya dalam organisasi profit, organisasi non-profit pun termasuk didalamnya organisasi dan lembaga polri, didalam menentukan dan menerapkan

³⁸ Sondang. P. Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Struktur Organisasi*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994). hlm. 43

strateginya pastilah bergantung pada SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya alam) yang ia miliki. Hal tersebut dikarenakan program-program yang telah tersusun dalam suatu organisasi pastilah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDM dan SDA yang mendukungnya. Dalam hal ini ekonomi menjadi faktor utama yang berpengaruh dalam penerapan strategi suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan suatu organisasi dalam menentukan langkahnya pastilah akan berorientasi pada sumber daya yang ada, baik itu sumber daya yang bersifat material atau in material. Meskipun target yang akan dicapai tinggi akan tetapi tanpa ada dukungan dari sisi materi maka dapat dipastikan target tersebut akan sulit terealisasi.

b. Faktor Politik

Politik yang sedang hangat terjadi baik dalam lingkungan internal organisasi ataupun di luar organisasi turut pula berpengaruh pada strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Politik yang mempengaruhi penetapan strategi dalam suatu organisasi ketika tidak disikapi dengan kemaslahatan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi dapat membawa dampak buruk terhadap organisasi yang bersangkutan. Organisasi bisa jadi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab demi mencapai tujuan pribadinya. Sebagai suatu contoh “gap” yang terjadi antara personal anggota dalam suatu organisasi dikarenakan perbedaan politik, maka sudah pasti strategi yang telah dicanangkan kurang bisa terlaksana seperti apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.

c. Faktor dari implikasi kebijakan pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku dalam suatu negara tentunya berimbas pula pada semua lini kehidupan tak terkecuali dalam organisasi dan lembaga polri. Hal demikian dikarenakan peraturan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, dan hal inilah yang turut pula mewarnai dalam strategi komunikasi yang diterapkan dalam suatu organisasi.

d. Faktor teknologi

Teknologi sebagai suatu sarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tentunya akan mendukung penetapan strategi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang masih menggunakan data manual. Begitupula berlaku dalam suatu organisasi yang masih menggunakan peralatan yang seadanya, tentunya target dari strategi yang dihasilkan akan bergantung dari sarana dan prasarana yang mendukungnya. Organisasi yang telah memiliki seperangkat teknologi yang telah maju, memungkinkan menerapkan strategi komunikasi dengan teknologi yang telah ada.

Dari faktor-faktor yang tersebut di atas, tentunya kita mengetahui bahwa strategi komunikasi yang diterapkan dalam suatu organisasi dan lembaga polri adalah sangat dipengaruhi dari faktor lingkungannya, baik itu lingkungan dalam ataupun lingkungan luar organisasi.

D. Teknik-teknik dan Proses dalam Penyusunan Strategi Komunikasi

Dalam prakteknya agar strategi yang diterapkan oleh sebuah organisasi dapat berhasil maksimal dan tidak terjadi ketimpangan kebijakan, maka antara rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) haruslah berjalan sejajar guna mewujudkan visi dan misi dari strategi yang ditargetkan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan teknik-teknik dalam penetapan strategi yang dimaksud. Dalam bukunya, Prof. Hadari Nawawi menyebutkan teknik-teknik yang bisa digunakan antara lain:³⁹

1. Teknik Matrik Faktor Internal dan Eksternal (*The Internal and Eksternal Factor Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menganalisa dan mengevaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari dalam atau luar organisasi.
2. Teknik Matrik Memperkuat dan Mengevaluasi Posisi (*The Strong Position and Evaluation Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara mencocokkan sumber daya internal yang dimiliki (kinerja organisasi) untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari resiko eksternal.
3. Teknik Matrik dari Kelompok Konsultan Boston (*The Boston Consulting Group matrik*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menetapkan strategi

³⁹ Nawawi, Hadari. 2005, *Manajemen Strategik, Organisasi Non Profit Bidang*

yang berbeda-beda untuk setiap biro atau departemen sebagai satu unit kesatuan.

Dalam penyusunan suatu strategi komunikasi, selain memerlukan suatu tehnik penyusunan strategi seperti yang tersebut di atas, disisi lain juga harus mempertimbangkan tahapan-tahapan penyusunannya. Tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi komunikasi dimaksudkan agar lebih mudah dalam melakukan manajemen atas strategi komunikasi yang akan diterapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi seperti yang dikemukakan oleh Triton PB dapat dikelompokkan kedalam enam tahapan penyusunan strategi.

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan
2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategi
3. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*)
4. Menyusun rencana penyumberdayaan
5. Mempertimbangkan keunggulan
6. Mempertimbangkan keberlanjutan⁴⁰

Selanjutnya ke-enam langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, seleksi mendasar dan kritis terhadap permasalahan. Seleksi tersebut biasanya dilakukan berdasarkan faktor internal ataupun eksternal yang menjadi penyebab

⁴⁰ Triton PB, *Marketing Strategic; Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing*, (Yogyakarta: Tugu Publiser, 208), hlm.1

permasalahan dalam suatu organisasi dakwah. Adapun seleksi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh permasalahan
- b. Mengidentifikasi dan mengelompokkan masing-masing permasalahan berdasarkan faktor internal dan eksternalnya
- c. Mengurutkan permasalahan berdasarkan tingkat kepentingannya
- d. Menentukan skala prioritas penyelesaian masalah

Kedua, menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategi. Tujuan dasar dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi hendaknya tidak bertentangan dengan arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang suatu organisasi, dikarenakan tujuan dan sasaran merupakan acuan yang menjadi dasar pengukiran berhasilnya strategi yang diterapkan.

Ketiga, yaitu *action plan*. Dalam penyusunan strategi, biasanya terdapat dua tipe yang harus diperhatikan yaitu: rencana konseptual (teoritis) dan rencana tindakan. Suatu rencana mungkin baik secara konseptual akan tetapi belum tentu sesuai atau baik di lapangan. Hal inilah yang kemudian sebuah strategi akan ditentukan oleh penyusunan rencana tindakan. Oleh karena itu dalam penyusunan suatu strategi setidaknya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meninjau kembali langkah-langkah dalam strategi yang akan mungkin diterapkan
- 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi faktor-faktor operasional, baik yang bersumber dari lingkungan internal ataupun eksternal

Selain itu John M. Bryson juga mengemukakan bahwa untuk mencapai strategi yang tepat, maka suatu organisasi dituntut untuk memperhatikan langkah-langkah yang tepat pula didalam menyusunnya. Adapun langkah-langkah tersebut seperti yang diungkapkannya adalah sebagai berikut:⁴¹

Pertama, yaitu memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menegosiasikan suatu kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision maker*), atau pembentuk opini (*opini leaders*) internal dan tidak mungkin menutup kemungkinan dari kalangan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategi dan langkah perencanaan yang penting yang akan diterapkan. Dengan kata lain, dalam suatu organisasi harus terdapat beberapa orang atau kelompok yang memulai suatu proses didalam penetapan suatu strategi, yang mana dalam suatu organisasi harus terdapat salah satu pemrakarsa yang menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong orang-orang penting pembuat keputusan. Ketika hal ini sudah bisa dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan orang, kelompok, atau suatu unit organisasi yang

⁴¹ M. Mftahuddin, *Perencanaan Strategis Sebagai Organisasi Sosial. Terjemah :Jhon M Bryson, Strategik Planning For Public And Nonprofit Organizations; A Guide Strengthening An Sustaining Organizational Achievent*. Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.55-57

harus dilibatkan dalam upaya perencanaan suatu strategi. Kesepakatan awal yang dihasilkan kemudian akan dinegosiasikan dengan setidak-tidaknya beberapa dari pembuat keputusan dalam organisasi tersebut.

Kedua, yaitu memperjelas mandat organisasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa mandat yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat krusial didalam dinamika roda suatu organisasi. Mandat yang bersifat formal ataupun informal yang ditempatkan pada suatu organisasi adalah merupakan suatu “keharusan” yang dihadapi oleh suatu organisasi yang bersangkutan. Dengan memperjelas mandate suatu organisasi, maka suatu organisasi dalam oprasionalnya dapat megetahui fungsi dan tugas, serta tujuan organisasi tersebut.

Ketiga, yaitu mempertegas dan memperjelas misi dan nilai-nilai yang diusung oleh suatu organisasi. Misi suatu organisasi yang dimaksud disini adalah misi yang berkaitan erat dengan mandatnya. Melihat sudut pandang tersebut, maka kehadiran suatu organisasi dapat dipahami sebagai suatu alat menuju akhir pencapaian tujuan, akan tetapi bukan akhir dari tujuan itu sendiri. Memperjelas misi haruslah disusun lebih dari sekedar memperjelas keberadaan organisasi.

Keempat, yaitu menilai lingkungan eksternal. Disini tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi.

Kelima, yaitu menilai lingkungan internal. Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*input*), strategi sekarang (proses) dan kinerja (*output*). Karena sebagian besar organisasi biasanya mempunyai banyak informasi tentang input organisasi, seperti gaji, pasokan, bangunan fisik dan personalia yang sama dengan personalia purna waktu (*full-time equivalent*).

Keenam, yaitu mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Identifikasi terhadap isu-isu strategis akan dapat berjalan maksimal apabila kelima langkah sebelumnya sudah bisa dilakukan dengan baik. Perencanaan strategis memfokuskan kepada tercapainya sasaran yang terbaik antara organisasi dan lingkungannya. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dan lingkungan eksternalnya dapat dipikirkan sebagai perencanaan dari luar ke dalam (*the outside in*). Perhatian kepada misi dan nilai-nilai maupun lingkungan internal dapat dianggap sebagai perencanaan dari dalam ke luar (*the inside out*).

Ketujuh, yaitu merumuskan strategi untuk mengolah informasi dari isu-isu yang telah didapat. Strategi diidentifikasi sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi yang diterapkan organisasi satu dengan lainnya dapat berbeda-beda dikarenakan tingkat, fungsi dan kerangka waktu yang diterapkan.

Kedelapan, yaitu merumuskan suatu visi organisasi yang efektif untuk waktu yang akan datang. Langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu bertindak. Sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Dari praktiknya kedelapan langkah perencanaan strategis tersebut diatas juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Strength* (kekuatan) Yaitu strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi dengan memanfaatkan keseluruhan kekuatan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- b. *Weakness* (kelemahan) Yakni strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi haruslah berdasar pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang diprediksikan bisa timbul.
- c. *Opportunity* (peluang) Yakni strategi yang diterapkan haruslah berdasarkan pada pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
- d. *Threats* (ancaman) Yakni strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk mengatasi ancaman. Dengan melihat keempat hal di atas, maka dapat diambil kesimpulan, dengan memperhatikan *SWOT* tersebut,

maka sebuah organisasi akan dapat menjalankan program-program yang telah disusun dan memperoleh hasil yang dikehendaki oleh organisasi.

E. Pengertian dan Ciri-ciri Terorisme

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*⁴².” Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku terror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

⁴² Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 98

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif⁴³, hal mana didasarkan atas siapa yang batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)⁴⁴. Sedangkan ciri-ciri terorisme Menurut *Terrorism Act 2000*, UK. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan

⁴³ Indriyanto Seno Adji, "*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 35.

⁴⁴ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002) hlm. 22.

atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.

2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Sedangkan ciri-ciri terorisme menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terbagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴⁵

1. Kelompok dan atau perorangan yang berniat mendirikan KHILAFAH menggantikan ideologi Pancasila & UUD 45 sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia
2. Mengujar kebencian antar etnis, antar agama & antar aliran agama, dengan tujuan provokasi untuk menantikan konflik horisontal dan destabilisasi politik keamanan Negara
3. Puritan, merasa aliran-nya “paling murni & paling suci” yang menimbulkan sikap intoleran terhadap orang di luar kelompok mereka, menganggap aliran lain sesat, sampai menghalalkan darah yang tidak sealian

⁴⁵ <https://voa-islamnews.com/bnpt-ciri-teroris-puritan-dan-gemar-mengkafirkan-orang-lain.html>

4. Anti NKRI, anti Pancasila dan anti persatuan bangsa, mengajak berbuat MAKAR gulingkan pemerintah dan mengajak memerangi kelompok lain.

F. Sejarah Dan Pemicu Munculnya Terorisme

a. Sejarah Terorisme

Terorisme berkembang sejak berabad lampau. Pada awalnya, terorisme hanya berupa kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme. Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling

efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh.

Bentuk pertama Terorisme terjadi sebelum Perang Dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh *Algerian Nationalist*. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.

Peristiwa terorisme ini menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung *World Trade Center* dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita

dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke *World Trade Center* merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tetapi juga dunia⁴⁶. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut. Kejadian ini merupakan isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia⁴⁷, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan

⁴⁶ Koalisi Internasional", <<http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, Bali, "*Terorisme dan HAM*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.

Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan Anti Terrorism, *Crime and Security Act, December 2001*, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan *Anti Terrorism Bill*⁴⁸.

Kemudian di Indonesia sendiri terjadi ledakan bom yang berkekuatan tinggi di pusat wisata di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan bom juga terjadi pada 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriot, disusul kemudian pada tanggal 9 September 2004 meledak di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta Metode pengeboman yang dipakai di Indonesia mirip dengan tindakan yang digunakan di beberapa negara seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Filipina, India dan Palestina. Bom mobil digunakan untuk menyerang target terbuka yang terletak di dekat jalan utama seperti kantor polisi, gedung pemerintahan dan pos penjagaan. Metode bom ransel seperti yang digunakan pada peristiwa Bom Bali 2 digunakan untuk menyerang target kerumunan manusia dengan lebih dekat. Penggunaan metode ini dikaitkan dengan semakin sulitnya menggunakan bom mobil setelah diketahui modus operasinya oleh aparat.

⁴⁸ Hilmar Farid, "*Perang Melawan Teroris*",
<http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html

b. Pemicu Munculnya Terorisme

Doktrin *salafy jihadi* yang melekat pada diri Jihadis di Indonesia, aksi terorisme sebagai perwujudan jihad pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang menindas Muslim. Seperti pengakuan Imam Samudra, “jihad adalah jalan Tuhan, dan pengeboman di Bali merupakan bagian dari jihad dari beberapa kaum Muslim untuk melawan para penjajah, Amerika dan sekutunya.”⁴⁹

Selain faktor *motivasional* melalui doktrin-doktrin *salafy jihadi*, anggota-anggota *Jamaah Islamiyah* melakukan aksi-aksi terorisme karena dipicu oleh tiga peristiwa spesifik yang terjadi sesaat pasca masa Orde Baru. Pertama adalah konflik komunal di Ambon dan Poso, kedua, fatwa dari tokoh jihad Afganistan, yaitu Usamah bin Laden pada tahun 1998, dan ketiga, peristiwa 9/11 yang meruntuhkan gedung WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001. Konflik komunal di Ambon dan Poso pada tahun 1999-2000 antara komunitas Kristen dan Islam memicu untuk memerangi kaum Kristen fanatik yang menyerang Islam. Peristiwa Bom Natal tahun 2000 adalah bentuk aksi perang terhadap umat Kristen tersebut. Sedangkan pemicu kedua berasal dari fatwa Usamah bin Laden, seorang tokoh jihad yang dikenal anggota JI sejak mereka mengikuti pelatihan militer di Afganistan. Pada tahun 1998 Usamah bin Laden mengeluarkan fatwa untuk berperang melawan Amerika dan sekutunya

⁴⁹ Solahudin, *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011). hlm. 32

sebagai kewajiban setiap muslim yang dapat dilakukan di negara manapun bila memungkinkan⁵⁰.

Fatwa ini mempengaruhi anggota JI seperti Hambali dan Ali Ghufron untuk segera melakukan aksi jihad melawan Amerika dan sekutunya. Selain itu, peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok al Qaeda juga pemicu berikutnya bagi Hambali dan anggota Mantiqi I untuk melakukan aksi terorisme. Dengan berhasilnya Al Qaeda menyerang Amerika yang disimbolkan dalam serangan 9/11, Hambali dan kawan-kawan semakin yakin untuk melakukan aksi serangan terhadap Amerika dan sekutunya di Asia Tenggara. Sebagai hasilnya, Bom Bali, Bom Marriot serta Bom Kedutaan Besar Australia menjadi bukti dari aksi terorisme Hambali dan kawan-kawan sebagai bentuk jihad melawan kafir. Sedangkan disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa, ada lima macam factor pemicu munculnya terorisme, yaitu:⁵¹

1. Kesukuan, Nasionalisme/Separatism (*Ethnicity, nationalism/separatism*)

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian

⁵⁰ ICG, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia," *Indonesia Briefing*, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2002)

⁵¹ <http://www.meteck.org/causesTerrorism.html>-

atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*)

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibidang "miskin dari sononya". Orang yang tinggal di tanah subur akan cenderung lebih makmur dibanding yang berdiam di lahan tandus. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.

3. Non demokrasi (*Non Democracy*)

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap

rakyatnya. Keterungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan (*Dehumanisation*)

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat, ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

5. Radikalisme agama (*Religion*)

Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata, beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya, menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasi kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat.

Dengan demikian, dari keseluruhan topik yang telah diuraikan pada bab ini, diawal diuraikan mengenai strategi, komunikasi, strategi komunikasi, lalu kemudian mengenai terorisme. Dapat diambil kesimpulan singkatnya, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi terutama dalam hal menyampaikan informasi

mengenai terorisme sangat diperlukan adanya suatu strategi dalam kegiatan komunikasi tersebut. Karena penting, agar semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tertata dan terkoordinir dengan baik dan sukses, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Jika telah terwujud dan tercapai hal ini tentunya akan menguntungkan bagi organisasi/lembaga dan instansi tersebut.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Singkat Polresta Palembang

Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Polda-polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisariss Besar Polisi Drs. Budi Cahyosiswanto, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta \pm 1.94 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran. Ada 14

polsek kota dan polsek kota psk Boom Baru, yang terdiri dari 8 polsek kota berstatus urban dan 6 polsek kota berstatus plural.

Menurut Bapak Agus Syaputra selaku Kbo Lantas (kepala pembinaan dan operasional lalu lintas), beliau menceritakan bahwa berdirinya Polresta Palembang ini dikenal dengan “Pertukaran Guling” yakni bahwa ada sebuah perusahaan yang mengadakan kerjasama kepada Mabes Polri, pada awalnya Polresta Palembang ini berdiri dan terletak di seputaran jln. Kol Iskandar lalu kemudian berpindah ke jln. K.H.A Bastari Seberang Ulu Jakabaring sekitar tahun 2000, dikarenakan sebuah perusahaan tersebut ingin membeli/memiliki tanah yang berada di jln Kol. Atmo tersebut untuk dibangunnya perusahaan baru, maka dari itu Mabes Polri dan Perusahaan tersebut mengadakan negosiasi dan terciptalah kesepakatan yang akhirnya perusahaan tersebut membangun gedung baru Polresta Palembang yang kini berada di jakabaring dengan kapasitas yang lebih bagus, sedangkan tanah yang ada di jalan Kol. Iskandar tersebut diambil alih oleh perusahaan tersebut⁵².

B. TUGAS POKOK KEPOLISIAN

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakkan hukum dalam rangka menjamin terlaksanannya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Untuk itu, Polresta

⁵² Hasil Wawancara Bpk. Agus Syahputra Selaku Kbo Lantas, pada tanggal 16 September 2016

Palembang sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut⁵³

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat

2. Tugas Polresta Palembang

Polresta Palembang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.

⁵³ Sumber: Dokumen Arsip Polresta Kota Palembang, pada tanggal 05 September 2016

C. VISI dan MISI

Pada sebuah organisasi/lembaga/instansi yang bergerak dibidang hukum tentunya memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah gerak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya semuanya terangkum dalam visi dan misi polresta sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Polri yang professional, bermoral, modern dan dapat dipercaya masyarakat.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan penegakkan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayom dan pelayanan.
- b. Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan mempercayai kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam kegiatan; pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas (misalnya, penyuluhan tentang rambu-rambu lintas), penegakkan hukum lalu lintas (misalnya, diberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan lintas), pengkajian masalah lalu lintas (misalnya, terjadi kecelakaan lalu lintas, pihak Polantas segera mengurus berkas perkara tersebut), registrasi dan identifikasi (misalnya, layanan pembuatan SIM dan penerbitan STNK serta TNKB).

- c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵⁴. (misalnya, adanya keluhan masyarakat tentang balap motor liar yang meresahkan dan mengancam ketentraman masyarakat, maka disinilah peran sosok polisi sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat)

Dari visi dan misi diatas bisa diperjelas bahwa, Polresta bertujuan untuk menjadikan anggota kepolisian yang selalu menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, hukum dan norma-norma yang ada sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bekerja sesuai aturan. Adapun gambarannya, misalnya Polantas yang bertugas dilapangan. Mendapati masyarakat yang tidak patuh pada tata tertib lalu lintas, maka sikap polisi harus tegas segera menindak (menilang) masyarakat yang melanggar tersebut, dalam artian tanpa menggunakan kekerasan. Dengan begitu akan terciptalah aparat kepolisian yang adil, dan memiliki moral serta akhlak yang mulia.

⁵⁴ Sumber: Polresta Palembang, pada tanggal 05 September 2016

D. PELAKSANAAN FUNGSI POLRESTA

Adapun pelaksanaan fungsi Polresta ialah sebagai berikut⁵⁵:

1. Pelaksanaan fungsi Intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning)
2. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
3. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dlam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Pelaksanaan fungsi Shabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, Patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan ujuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan VIP.

⁵⁵ Sumber: Polresta Kota Palembang, pada tanggal 05 September 2016

5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**E. DAFTAR NAMA STAF KEPOLISIAN/PEJABAT YANG ADA DI
POLRESTA PALEMBANG**

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Pend Umum	Pend Polri	Tmpt, Tgl Lahir
1	TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K	KOMBES POL	KA POLRESTA	SMA	AKPOL 1994	JKT, 11-07 1972
2	ISKANDAR FITRIANA SUTISNA, SIK, Msi	AKBP	WAKA POLRESTA	S2	AKPOL 1991	PLG, 03-01 1968
3	LISBETH DOLOK SARIBU	KOMPOL	KABAG SUMDA	S1	CAPA	MDN, 19-08 1965

4	HERMANSYAH SH	IPDA	KASUB BAG SUMDA	S1	SEBA MIL SUK	PLG, 20-03 1969
5	DAFREL, S.SOS	PENATA TK.I/III.D	PAUR MIN BAG SUMDA	S1	-	KERIN CI, 16-04 1968
6	GAZALI ALI, SE	KOMPOL	KABAG RENCANA	S1	SESPIMMA	PLG, 03-12 1972
7	IDA SUSANTI, S.SOS	PENATA III.C	PAUR MIN BAGREN	S1	-	PLG, 21-07 1963
8	AI RUMSIAH	PENATA III.C	KASUB DALGAR	SMA	-	KARA WANG 10-08 1964
9	LINDA, SE	PENDA III.A	PAUR DALGAR BAGREN	S1	-	PLG, 03-08 1972
10	TAUFIK AZMI	PENGTU	BANUM	SMA	-	PLG,

		II.D	MIN BAGREN			06-06 1964
11	HARIANI MAGDALENA	PENGTU II.C	BANUM DALGAR	SMA	-	PLG, 07-01 1972
12	ZULKIFLI DAMHURI	IPTU	KASIUM	SMA	SAG	PLG, 15-06 1959
13	ZAINURI	AIPTU	KASUB BAG SIUM	STM	SEBA	PDPO, 27-12 1962
14	KUSMANUDIN	AIPTU	BRIG SIUM	SMA	SECABA POLRI	PLG, 14-05 1969
15	SOLEHAN	AIPTU	BRIG SIUM	SMA	SEBA MILSUK	PLG, 05-04 1961
16	JONNY NAPITULU	PENATA TK.I/III.D	KASIKEU	S1	-	MDN 02-12 1964
17	NURBAITI	PENATA	KASUB	SMA	-	PLG

		III.C	SIKEU			11-15 1965
18	SUTANTO	PENGTU	BANUM SIKEU	SMA	-	PLG 16-05 1973
19	YUNIARSIH	PENGTU	BANUM SIKEU	SMA	-	PLG 01-06 1977
20	AKHMAD BAKRI	AKP	KA SIPROPAM	S1	-	PLG, 04-07 1971
21	HERIANSYAH	IPDA	KANIT PROVOS	SMU	SAG	CRP 24-04 1867
22	SITI SUPARNI	PENGTU II.D	BANUM SIPROPAM	SMU	DIKTUK BRIG	PLG 09-08 1958
23	NURAINI	PENGTU II.D	BANUM SIPROPAM	SMU	DIKTUK BRIG	ACEH 05-08 1964
24	EFENDI, SH.	IPTU	KA SIWAS	S1/S2	SAG	PLG

	MSI					05-04 1962
25	REKSEN ARISANDI, SH	BRIGADI R	KASUB BAGSIWAS	S1	-	PLG 09-09 1965
26	HANDAYANI	PENGTU II.B	BANUM SIWAS	SMA	-	PLG 03-03 1975
27	CEK MANTRI	IPTU	KANIT SPKT	SMA	SEBA MILSUK	LMP 30-12 1961
28	ZULFAKHRI	BRIPKA	BRIG SPKT	SMA	SEBA	PLG 09-05 1982
29	ZAINUDIN	BRIGADI R	BRIG SPKT	SMA	SECABA	PLG 05-05 1963
30	BERNARD YOBEL GULTOM, SH	BRIGADI R	BRIG SPKT	S1	-	LHT 04-08 1986
31	BUDI	KOMPOL	KA	S1	-	BND

	SANTOSO, S.SOS		SATINTELK AM			24-10 1977
32	KOMARUZ ZAMAN	AIPTU	BRIG SAT INTELKAM	SMA	-	PLG 19-12 1970
33	NURMAN SYAH LA	AIPTU	BRIG SAT INTELKAM	STM	SEBA POLRI	PLG 28-07 1970
34	MARULI PARDEDE, SH	AKP	KASAT RESKRIM	S1	SECABA POLRI	PLG 18-08 1972
35	GOPUR	AIPTU	KASUB SATRESKRI M	SMA	SEBA POLRI	LMP 20-05 1966
36	ARMADAN, SH	AIPTU	BRIG SAT RESKRIM	S1	SEBA POLRI	PLG 10-11 1976
37	ROCKY HASUNAN MARPAUNG, SH, SIK, MH	KOMPOL	KA SAT NARKOBA	-	AKPOL	MDN 12-02 1968

38	IMELDA RAHMAT	IPTU	KASUB SAT NARKOBA	SMA	SIP	JKT 24-01 1971
39	AGUS MULYADI	AIPTU	BRIG SAT NARKOBA	SMU	SEBA MILSUK	BDG 28-08 1974
40	MUHAMMAD ABDULLAH	KOMPOL	KA SAT BINMAS	S1	CABA	SBY 18-08 1963
41	M. MAKMUN ROSYIDI	IPDA	KASUB BAG SAT BINMAS	MAN	SEBA MILSUK	OKI 27-08 1968
42	HADI PRAYITNO	BRIPKA	BRIG SAT BINMAS	SMK	DIKMABA	PLG 29-03 1981
43	AFRIANSYAH	BRIPKA	BRIG SAT BINMAS	SMA	-	PLG 08-04 1982
44	RAKHMAT SYAWAL PAKPAHAN	AKP	KA SAT SABHARA	SMA	SEBA POLRI	MDN 16-01 1968

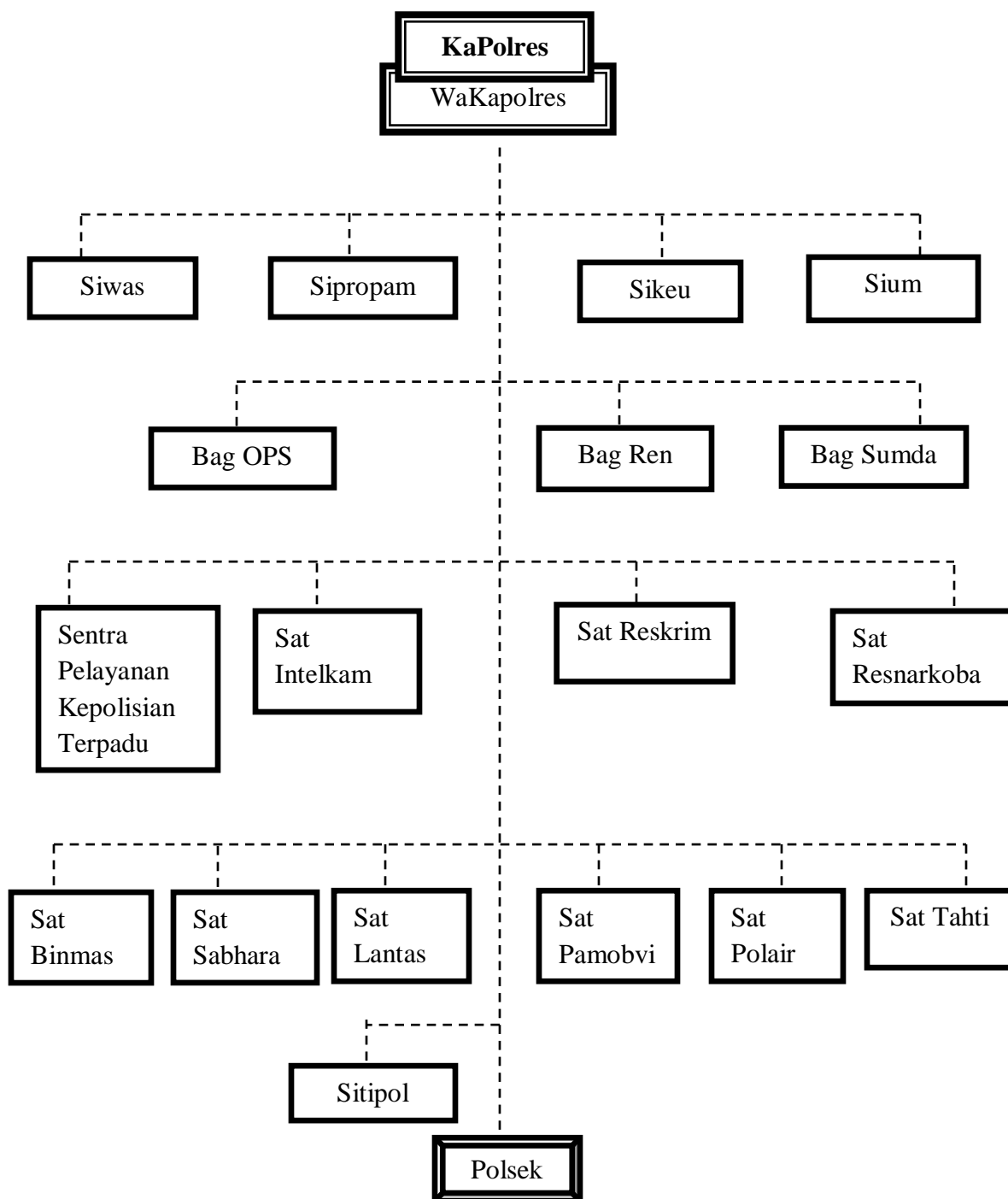
45	ISKANDAR	IPDA	KASUB BAG SAT SABHARA	SMA	SAG	PLG 14-05 1965
46	HARIS BATARA, SIK	KOMPOL	KASAT LANTAS	SMA	AKPOL	PLG 14-11 1968
47	SULIS PUJIONO, SH	AKP	KANIT TURJAWAL I	S1	SIP	PLG 16-03 1973
48	AHMAD RIZAL	IPTU	KANIT DIKYASA	STM	POLSUK/ SAG	PLG 09-05 1965
49	RICKY MOZAM, SH	IPDA	KANIT RED IDENT	S1	SIP	KLTM 01-02 1988
50	FG. MALINA, SH	IPTU	KANIT LAKA	S1	SIP	PLG 09-01 1971

F. STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA PALEMBANG

Struktur Organisasi Polresta Palembang mengacu pada Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Struktur organisasi merupakan hal penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagaian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Berikut struktur organisasi Polresta Palembang.⁵⁶

⁵⁶ Sumber: Dok. Polresta Kota Palembang Bag Humas, pada tanggal 05 September 2016

Gambar 1. Struktur Organisasi Polresta Palembang



Sumber: Dok. Bagian Humas Polresta Palembang

G. DESKRIPSI SUSUNAN ORGANISASI POLRESTA PALEMBANG

Berdasarkan Perkap No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, adapun deskripsi tugasnya sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

a. Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Kapolresta

Kapolres merupakan pimpinan Polresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polresta dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Dalam hal ini Kapolres tetap berkoordinasi kepada Kapolda terkait dengan pelaksanaan tugasnya dan selalu memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda.

b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat WaKa Polresta

Waka Polres merupakan unsur pimpinan Polresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Waka Polres memiliki tugas, membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polresta.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

a. Seksi Pengawasan (Siwas)

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab dibawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan tindakan sanksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.

b. Seksi Provos dan Paminal (Sipropam)

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

c. Seksi Keuangan (Sikeu)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

d. Seksi Umum (Sium)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Misalnya seperti, mengagendakan surat masuk/keluar, mengagendakan rapat pimpinan, menjadi protokoler untuk acara penting terkait dengan Polresta.

e. Bagian Operasi (Bag Ops)

Bag Ops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polresta.

f. Bagian Perencanaan (Bag Ren)

Bag Ren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Ren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya. Kegiatan Bag Ren antara lain seperti, menyusun laporan realisasi anggaran (LRA), penyusunan penetapan kinerja meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

g. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda)

Bag Sumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Sumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

b. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam)

Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan

politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

c. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan.

d. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya Satsabhara bertanggung jawab kepada Kapolres.

g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Sat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Semua tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ada di Polresta Palembang serta tetap berkoordinasi kepada Kapolres selaku Pimpinan.

H. Satuan Pengamanan Obyek Vital (Satpamobvit)

Sat Pamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, dan bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian. Pengamanan sebagaimana yang dimaksud

dilaksanakan oleh Polresta yang dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementerian, lembaga negara, dan perwakilan negara/lembaga asing

h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polresta, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Satuan Polisi Air (Satpolair)

Sat Polair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam melaksanakan tugasnya Satpolair bertanggung jawab kepada Kapolres.

4. Unsur Pendukung:

Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Sitipol)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Polresta adalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek)⁵⁷

Polsek (Kepolisian sektor) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres atau bisa dikatakan cabang kepolisian yang berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Masing-masing unsur tersebut diatas saling berkoordinasi satu sama lain dan memiliki kewenangan tersendiri serta harus bisa mempertanggung jawabkan tugasnya tersebut kepada pimpinan (Kapolres). Agar terwujudnya lingkungan kerja yang efektif dan korelatif.

H. DESKRIPSI SAT INTELKAM POLRESTA PALEMBANG

- a. Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sat Intelkam menyelenggarakan fungsi:
 1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres

⁵⁷ Sumber: Dok. Polresta Kota Palembang Bag Sium, pada tanggal 05 September 2016

2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen
 3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah
 4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres
 5. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
 6. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan
 7. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
 8. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.
- c. Sat Intelkam dipimpin oleh Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yaitu :

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kapolres berkaitan dengan fungsi Intelijen, baik untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kota Palembang;
2. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan pembinaan dan operasional kesatuan;
3. Melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan Kapolres yang dikoordinasikan dengan Wakapolres;
4. Memberikan UUK (Unsur Utama Keterangan) kepada para Kanit Intelkam Polres maupun Polsek melalui Kapolsek
5. Memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan guna peningkatan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan operasional kepada para Kanit dan Staf, maupun pengembang fungsi Intel Polsek
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas fungsi Intel
7. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dengan instansi/badan/kesatuan terkait lainnya baik di dalam maupun di lingkungan Polri demi efektifitas tugas
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau sesuai perintah Kapolres dan

9. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibawah kendali Wakapolres, Kasat Intelkam dibantu Wakasat Intelkam, bertanggung jawab kepada Kapolres.
- d. Kasat Intelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasat Intelkam), yaitu :
 1. Membantu tugas-tugas Kasat Intelkam khususnya yang berkaitan langsung dengan pembinaan anggota dan pelaksanaan tugas staf
 2. Mewakili Kasat Intelkam baik yang menyangkut kegiatan Intern kesatuan maupun ekstern kewilayahan
 3. Mengkoordinasikan penugasan anggota melalui Kaur Bin Ops dan para Kanit operasional
 4. Mengkoordinir laporan hasil operasional Unit Opsnal untuk ditindak lanjuti dan atau dibuat produk Intelijen
 5. Menindak lanjuti disposisi surat-surat dari Kasat, membuat konsep surat, meneliti dan membuat produk Intelijen
 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian anggota Sat Intelkam; dan
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat Intelkam.
- e. Sat Intelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan,

menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah, serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

Urbinopsnal, dengan dibantu Bintara/PNS II/I sebagai Bamin dan Banum, melaksanakan tugas tugas :

- a) menyelenggarakan urusan administrasi operasi dan urusan pelayanan masyarakat;
- b) merumuskan dan mengembangkan prosedur HTCK bagi pelaksanaan fungsi Sat Intelkam serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya
- c) mengarahkan pembuatan produk intel serta menyajikannya kepada user
- d) mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas staf;
- e) menyusun rencana dan program kegiatan yang dinamis dan statis
- f) menyelenggarakan sistem pengamanan pasif melalui pengumpulan data hasil operasional dan hasil pelayanan masyarakat (SKCK, Ijin dan STM)
- g) mengarahkan penyelenggaraan sistem dokumentasi sehingga mudah dicari
- h) melaporkan semua hasil kegiatan staf secara periodik dan insidental kepada Kasatintelkam melalui Wakasat Intelkam;

Urbinopsnal Sat Intelkam dipimpin oleh Ka Urbinopsnal Sat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakasat Intelkam

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Urmintu Sat Intelkam dipimpin oleh Ka Urmintu Sat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakasat Intelkam, dengan melaksanakan :

- a) membantu tugas-tugas Kasat Intelkam khususnya yang berkaitan langsung dengan pembinaan anggota dan pelaksanaan tugas staf
- b) membantu Wakasat Intelkam baik yang menyangkut kegiatan Intern kesatuan maupun ekstern kewilayahan
- c) mengkoordinasikan penugasan anggota melalui Kaur Bin Ops dan para Kanit operasional
- d) mengkoordinir laporan hasil operasional Unit Opsnal untuk ditindak lanjuti dan atau dibuat produk Intelijen

- e) menindak lanjuti disposisi surat-surat dari Kasat/Wakasat, membuat konsep surat, meneliti dan membuat produk Intelijen
 - f) turut membantu melakukan pengawasan dan pengendalian anggota Sat Intelkam dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat via Wakasat.
3. Unit, terdiri dari 4 (empat) Unit, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Unit Sat Intelkam PolrestaPalembang, ada 4 (empat) Unit yaitu :

- a) Unit I/Politik

Unit I/Politik, Kanit bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dibawah kendali Wakasat Intelkam dengan dibantu Kasubnit I dan II serta Bintara Unit bertugas :

- 1) Menyelenggarakan pendataan hasil-hasil pemilu dan pemetaan kekuatan politik

- 2) Melakukan Pengamanan dan penggalangan terhadap tokoh ormas, orpol, parpol, DPRD dan pemerintahan
 - 3) Melakukan Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan politik (Musda, Muscab, Rakercabang, Sarasehan dan lain-lain) dan
 - 4) melakukan Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap proses pelaksanaan Pilkada.
- b) Unit II/Ekonomi, Kanit bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dibawah kendali Wakasat Intelkam dengan dibantu Kasubnit I dan II serta Bintara Unit bertugas :
- 1) Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kegiatan industri, perdagangan, perhubungan dan perbankan
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga sembako
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga BBM, TDL, PAM dan Telepon
 - 4) Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku penimbunan sembako dan penyalahgunaan distribusi BBM
 - 5) melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan ekonomi.

c) Unit III/Sosbud, Kanit bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dibawah kendali Wakasat Intelkam dengan dibantu Kasubnit I dan II serta Bintara Unit bertugas :

- 1) Melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan agama dan aliran kepercayaan
- 2) Melakukan Pengamanan kegiatan masyarakat, rapat /seminar, mogok kerja dan keramaian umum; dan
- 3) Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap masalah konflik-konflik sosial.

d. Unit IV/Kamneg, Kanit bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam dibawah kendali Wakasat Intelkam dengan dibantu Kasubnit I dan II serta Bintara Unit bertugas :

- 1) Fungsi tugas Kamneg:
 - i. Melakukan penyelidikan dan inventarisir kelompok-kelompok pelaku kejahatan dan residivis
 - ii. Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap ormas, orpol, LSM yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah
 - iii. Melakukan pengamanan terhadap obyek-obyek vital
 - iv. Melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang menonjol (curas, curat, curanmor, dan narkoba) dan

- v. Melakukan Penyelidikan terhadap kasus yang bersifat Trans National Crime.

2) Kasubnit I/Wassendak), bertugas :

- i. Menyelenggarakan pendataan dan pengawasan terhadap penjual dan pemakai bahan kimia, penyimpan/pemakai/penjual bahan peledak dan senpi
- ii. Melaksanakan pengecekan kelengkapan administrasi secara berkala terhadap pemilik senpi baik perorangan maupun perusahaan
- iii. Melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan handak, senpi dan amunisi dan
- iv. Melakukan pengawasan terhadap penjual dan pengguna senapan angin kaliber 4,5 milimeter.

3) Kasubnit II/Pengawasan Orang Asing, bertugas :

- i. Melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Orang Asing)
- ii. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ijin keimigrasian;

- iii. Melakukan Penyelidikan dan pengawasan terhadap imigran gelap
- iv. Melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan WNA, LSM/Wartawan asing dan kunjungan kenegaraan
- v. Melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan yang dimiliki / sering dikunjungi orang asing
- vi. Melakukan Pengamanan dan pengawasan terhadap aset-aset orang asing/status penanaman modal asing
- vii. Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran /kejahatan yang dilakukan orang asing.

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian. Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris “Intelligence” yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai Organisasi dan sebagai Kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah

namun selalu berkaitan satu dengan yang lain. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Intelijen Kepolisian atau police intelligence mencakup “criminal intelligence”, yang merupakan bagian integral dari fungsi utama Polri, yaitu represif, preventif, dan pembinaan masyarakat (yang akhir ini kemudian sering disebut pre-emptif). Police intelligence dan criminal intelligence mencakup semua kriminalitas dari yang konvensional crime sampai yang canggih, seperti terrorisme, human trafficking, weapon trafficking, drug trafficking, money laundering, corruption, cyber crime dan lain-lain.

Police intelligence bagi Polri lebih luas dari criminal intelligence, karena harus mampu mendeteksi kerawanan konflik vertikal dan horizontal (SARA). Polri harus mahir dalam conflict resolution dan negosiasi agar konflik tidak menjadi tawuran dengan kekerasan. Ruang lingkup criminal intelligence saja sudah cukup luas dan complex, karena mencakup conventional (traditional) crimes, seperti pencurian,

perampokkan, pembunuhan, penyiksaan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya, sampai kepada organized transnational crimes, dari terrorisme, money laundering, economic crime, human, weapon, drug trafficking, cyber crime, corruption dan sebagainya.

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan⁵⁸.

⁵⁸ Humas.polri.go.id

Menurut Karwita dan Saronto , tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut⁵⁹:

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri
4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

⁵⁹ Saronto y wahyu, Karwita Jasir. 2001. Intelijen teori, aplikasi dan modernisasi. Jakarta: Ekalaya Saputra

Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, Karwita dan Saronto (2001: 126-127) mengemukakan empat peran yang diemban oleh Intelkam yaitu⁶⁰:

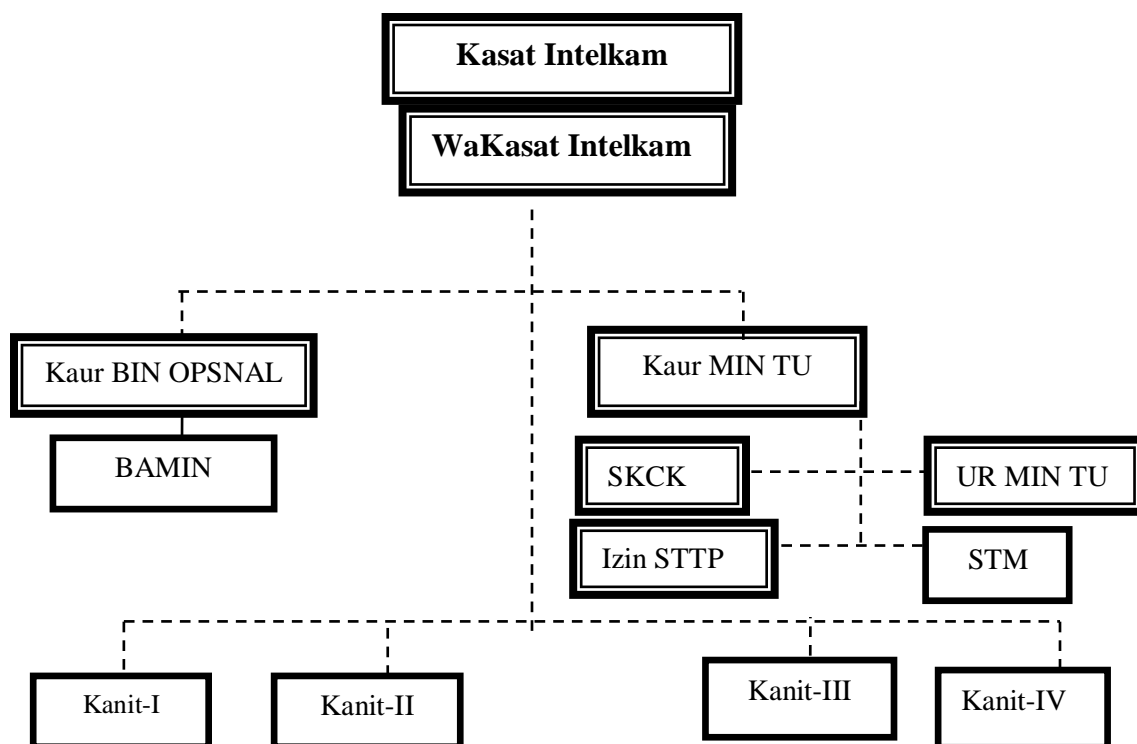
Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri.

Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/ gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri,

Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

⁶⁰ ibid

Gambar 2. Struktur Organisasi Satintelkam Polresta Palembang



Sumber. Dok. Bagian SIUM Polresta Palembang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang

Unsur yang paling penting dalam komunikasi bukan hanya sekadar pada apa yang kita tulis atau kita katakan, tetapi lebih pada karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Jika kata-kata atau pun tulisan kita dibangun dari hubungan antar sesama manusia, bukan dari diri kita yang paling dalam (karakter), maka orang lain akan melihat atau membaca sikap kita⁶¹. Jadi syarat utama dalam komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dari pondasi integritas pribadi yang kuat. Komunikasi merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya

⁶¹ Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 17

berupa lambang-lambang, pesan informasi) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikasikan).

Komunikasi dalam setiap situasi adalah seseorang yang saling bertukar pesan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Karena setiap orang mempunyai tujuan berbeda, maka dari itu komunikasi yang efektif haruslah bersifat interaktif⁶². Dalam mengkomunikasikan pada masyarakat tentang bahayanya radikalisme dan terorisme agar dapat berjalan sesuai harapan tentunya sebuah lembaga harus memiliki atau membuat strategi. Maksud strategi sendiri ialah, cara untuk mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang muncul serta menyiapkan rencana-rencana untuk masa yang akan datang.

Pada Satintelkam Polresta Palembang strategi yang digunakan dalam kegiatan komunikasinya terkait dengan bahaya-bahaya terorisme pada masyarakat ialah meliputi Dikmas (pendidikan masyarakat), Binluh (bimbingan penyuluhan) dan Hibauan Langsung kepada masyarakat umum, selain itu tidak ketinggalan juga melalui media. Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif apabila disampaikan secara langsung juga agar bisa berinteraksi secara langsung kepada Satintelkam terkait dengan bahaya terorisme.

Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan harapan dan yang telah direncanakan. Satintelkam Polresta Palembang harus mampu dan benar-benar menerapkan tugas kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik dan serius. Karena strategi

⁶² Gustav W. Friedrich, *Strategic Communication in Business and the Professions*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5

komunikasi yang tepat, harus dilakukan dengan jelas dan terarah. Sehingga apa yang telah direncanakan dan yang diinginkan lembaga/instansi/organisasi khususnya Satintelkam Polresta Palembang bisa mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan sesuai harapan.

Teori Strategi Komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori menurut Dan O'hair yaitu Teori Komunikasi Strategis yang menurutnya komunikasi strategis berarti dapat memanfaatkan potensi di tiga area, yakni:

1. **Pengetahuan Situasional**, (informasi yang dimiliki lembaga/organisasi, dan syarat-syarat agar komunikasi sukses dalam konteks tertentu).
2. **Penentuan Tujuan**, (menentukan strategi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan)
3. **Kompetensi Komunikasi**, (kemampuan menyampaikan pesan secara kompeten dengan memilih, tipe pesan, saluran dan gaya penyampaian yang tepat).

Teori ini tepat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut tentang Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal gerakan terorisme Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang terkait, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengetahuan Situasional dalam konteks organisasi (nilai dan etika yang ditanamkan sebagai syarat demi mendukung suksesnya komunikasi)**

Salah satu elemen kunci dari setiap aktivitas komunikasi ialah mampu mengenali sasaran yang hendak dituju dan pandai membaca situasi. Selain itu, dalam sebuah lembaga instansi/ organisasi demi keefektifan dan kelancaran kegiatan komunikasi tentunya diperlukan nilai dan etika yang diterapkan dalam sebuah lembaga instansi/organisasi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan tugas dan menentukan keputusan. Nilai dan etika yang dimaksud adalah prinsip atau pandangan yang dianggap penting dan diyakini oleh setiap individu yang berada dilingkup organisasi tersebut. Adanya nilai dan etika yang ditanamkan dalam sebuah lembaga instansi/organisasi sangat penting. Seperti yang dituturkan oleh bapak Agus Saputra bahwa:

“Nilai-nilai dan etika yang ditanamkan di lembaga kepolisian khususnya Polresta Palembang ini tentu ada. kedisiplinan, loyalitas, semangat kerja yang ditanamkan pada setiap individu anggota polisi. Kedisiplinan itu contohnya, apel pagi yang dilakukan setiap hari pada pukul 05.45 tidak boleh ada yang telat, bila ada yang telat tentu akan ditegur dan diberi hukuman apabila sudah terlalu sering. Loyalitas misalnya, bila ada polisi yang diberi perintah melampaui batas kewenangannya, maka anggota polisi tersebut wajib melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan hasilnya kepada atasan/pimpinan, ia harus jujur melaporkan perkaranya tanpa di tambah-tambahi dan ditutup-tutupi. Untuk semangat kerja misalnya lagi, di lapangan bila ditugaskan atas perintah pimpinan tanpa ragu untuk melaksanakan perinyah tersebut”.⁶³

Nilai dan etika tersebut haruslah diterapkan dalam wujud nyata, bukan hanya sekedar diucapkan dan pajangan semata. Karena sebagai Aparat penegak hukum, ketertiban dan keamanan, seorang polisi akan dipandang masyarakat terkait dengan peran dan posisinya sebagai prajurit Negara. Kemudian yang seharusnya, sikap dan

⁶³ Kumpul Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, *Wawancara*, pada tanggal 16 September 2016

pola tindakan seorang polisi harus mencerminkan aparat sejati yang sesungguhnya dalam artian aparat yang benar-benar bekerja dan mengabdikan serta mendedikasikan dirinya untuk Bangsa dan Negara Indonesia. Dalam sebuah lembaga/organisasi nilai dan etika sangat penting dibutuhkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan komunikasi dan melaksanakan tugas, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan negatif pada lembaga kepolisian. Dengan adanya nilai dan etika dalam lembaga/organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang positif.

Pada SatIntelkam Polresta Palembang nilai dan etika tersebut telah ditanamkan pada setiap individu yang bekerja di Polresta Palembang. Hal ini dibuktikan dalam wawancara peneliti terhadap pak Kompol Budi Santoso, S.Sos, selaku Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan Polresta Palembang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Begitu seseorang sudah lahir jadi polisi harus punya loyalitas, semangat kerja, disiplin, karena kalau tidak disiplin yah tidak jadi anggota”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas tergambar jelas bahwa nilai dan etika yang ditanamkan pada Polresta Palembang telah diwujudkan dalam kerja nyata. Karena memang begitulah seharusnya sebagai anggota polisi. Dan sebagai aparat kepolisian nantinya akan dipertanggungjawabkan atas tugas yang diembannya.

2. Penentuan Tujuan (mengidentifikasi masalah, menentukan strategi, dan menentukan sumber daya yang diperlukan)

⁶⁴ *Ibid*, wawancara Kompol Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan, pada tanggal 16 September 2016

Penentuan tujuan merupakan bagian kedua dari tiga bagian model komunikasi strategis. Setelah sebelumnya mampu mengetahui situasi dan menentukan syarat demi keberhasilan dan suksesnya kegiatan komunikasi, maka lembaga/organisasi selanjutnya dapat menyusun tujuan komunikasi yang tepat. Dalam situasi dimana lembaga/organisasi harus mampu berkomunikasi untuk mencapai tujuan, biasanya akan lebih baik untuk menentukan tujuan secara spesifik ketimbang tujuan yang umum. Tujuan yang spesifik memungkinkan komunikator untuk memetakan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dari suatu tujuan⁶⁵.

Untuk mencapai tujuan tentunya sebuah lembaga/organisasi harus menentukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang timbul, dengan menentukan strategi yang jelas dan tepat maka lembaga/organisasi akan mencapai keberhasilan dan tujuan yang dicapai sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Satintelkam Polresta Palembang memiliki strategi dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme, sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Budi Santoso bahwa:

“untuk strategi yang digunakan oleh Satintelkam Polresta Palembang ini terkait dengan bahaya terorisme, yah kita kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dengan remaja-remaja, remaja ini tingkat smp, sma, mahasiswa kita komunikasikan tentang bahaya terorisme, kita tanamkan sejak dini tentang bahaya terorisme kepada masyarakat”.⁶⁶

⁶⁵ Gustav W. Friedrich, *Strategic Communication in Business and the Professions*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47

⁶⁶ *Ibid*, wawancara Kopol Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, pada tanggal 16 September 2016

Selain itu dalam wawancara selanjutnya, terkait dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi beliau menambahkan:

“iya jelas kita kan harus memberdayakan semua potensi yang ada pada anggota, anggota mungkin punya level dimahasiswa yah kita salurkan mahasiswa untuk tatap muka, sosialisasi tentang bahaya terorisme, yah mungkin kemampuannya dilevel anak smp yah kita salurkan juga jadi semuanya komunikasi itu berjalan”.⁶⁷

Terkait dengan hal ini Satintelkam Polresta Palembang telah melakukan berbagai cara dalam upaya mengidentifikasi untuk mengoptimisasikan pencegahan terorisme. Berdasarkan pernyataan Kompol Budi Santoso, S.Sos pada wawancara peneliti beliau menuturkan:

“kita kan tau cek kelapangan, ada laporan misalnya, ini ada laporan dari masyarakat RT/RW lurah setempat bahwa itu ada pengajian yang menyampaikan bahaya terorisme tapi disisipkan tentang terorisme, yah kita kan ada laporan-laporan ketika ada laporan langsung kita cek ke lapangan”.⁶⁸

Agar berjalan strategi yang telah ditetapkan perlu adanya kerja sama atau komitmen yang dibangun antara Polisi Satuan Intelijen dan keamanan dan

⁶⁷ *Ibid*, wawancara Kompol Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, pada tanggal 16 September 2016

⁶⁸ *Ibid*, wawancara Kompol Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, pada tanggal 16 September 2016

masyarakat sehingga dapat terciptanya keamanan, dan kedamaian pada masyarakat. Karena komunikasi yang efektif dan sukses terjalin dengan adanya kesepakatan antar kedua pihak yakni komunikator dan komunikan. Pada pelaksanaan kegiatan komunikasi terkait dengan pencegahan terorisme mempersiapkan seluruh keperluan alat operasional, waktu, serta sumber daya, menjadi hal penting. Dengan memperkirakan semuanya lebih awal, rencana dan kegiatan dapat tersusun secara lebih konkret agar dapat mencapai tujuan.

Manfaat dari adanya langkah-langkah penentuan tujuan ini ialah dapat menghasilkan kegiatan komunikasi yang efektif, selain itu dapat membantu mengarahkan perhatian dan tindakan pada saat kegiatan komunikasi berlangsung. Tujuan spesifik membantu lembaga/organisasi agar tidak terjadi penyimpangan langkah dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi.

3. Kompetensi Komunikasi, (kemampuan menyampaikan pesan secara kompeten dengan memilih, tipe pesan, saluran/media dan gaya penyampaian yang tepat).

Kompetensi komunikasi adalah bagian terakhir dari model komunikasi strategis. Kompetensi komunikasi merupakan kemampuan atau keahlian dalam menyampaikan informasi pesan kepada sasaran (komunikan). Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun hubungan manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Meskipun seseorang

melakukan kegiatan komunikasi setiap hari, akan tetapi jarang sekali orang yang tahu sejauh mana efektifitas komunikasinya. Setelah menentukan tujuan, strategi dan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan, pada bagian inilah seluruh dari langkah penentuan tujuan tersebut diterapkan melalui kemampuan berkomunikasi. Berhubungan kegiatan komunikasi tentunya suatu lembaga/organisasi harus menentukan tipe pesan dan gaya penyampaian pesan yang bagaimana, yang akan disampaikan kepada sasarannya (masyarakat). Berdasarkan wawancara peneliti kepada bapak Budi Santoso, beliau menuturkan bahwa:

“tipe pesan yang digunakan pada Satintelkam Polresta Palembang ada dua yaitu, informatif dan persuasif. Informatif. Kalau untuk gaya penyampaian pesan yang digunakan, yah gayanya menyesuaikan, kondisional lah, kalau targetnya smp yah dengan gaya anak smp yah tergantung audiens nya, bisa juga menggunakan pengeras suara (Toak), kemudian menggunakan HT *Tranking*, HT ini bersifat menyeluruh terhubung keseluruhan koordinasi gabungan wilayah mulai dari Polsek dan Polresta lainnya. Isi pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat tersebut antara lain; yah pesan-pesan kamtibmas, bahwa terorisme itu bahaya mengancam keutuhan NKRI.⁶⁹

Terkait dengan hal ini Satintelkam Polresta Palembang telah melakukan berbagai program dalam upaya untuk mengoptimalisasikan pencegahan terorisme. Berdasarkan pernyataan Kompil Budi santoso pada wawancara peneliti beliau menuturkan:

⁶⁹ *Ibid*, wawancara Kompil Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, pada tanggal 16 September 2016

“pertama adalah bagian kamtibmas, memberikan himbauan-himbauan, penyuluhan, kemudian mensosialisakan lagi bahwa wajib lapor 1x24 jam”.⁷⁰

Dalam melakukan kegiatan komunikasi bagi setiap lembaga/organisasi sangatlah penting menentukan poin-poin penting komunikasi yang akan berkenaan pada pelaksanaan kegiatan komunikasinya. Setelah menentukan tipe pesan dan gaya penyampaiannya, tidak akan lengkap dan efektif rasanya apabila pesan dan informasi yang telah dirancang disampaikan tanpa melalui saluran/media. Media yang dimaksud disini adalah saluran/alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi yang dimiliki kepada sasaran/khalayak. Semua pesan-pesan dan informasi yang dimiliki Satintelkam Polresta Palembang disiarkan melalui media dengan tujuan supaya khalayak (masyarakat) mudah memahami dan mendapatkan informasi terkait dengan tata tertib lalu lintas, sehingga dengan hal ini diharapkan dapat menekan angka pencegahan terorisme. Adapun media-media yang digunakan dan bekerja sama dengan Satintelkam Polresta Palembang ialah sebagai berikut:

a. Media Cetak

Media cetak yang dimaksud ialah informasi pesan yang disiarkan dengan cara dicetak atau biasa dikenal dengan koran (surat kabar), baliho, dan spanduk. Surat kabar bisa dikatakan media tertua sebelum ditemukannya radio dan televisi. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek huruf, serta lebih banyak disenangi oleh orang tua daripada kaum remaja dan anak-

⁷⁰ *Ibid*, wawancara Kompol Budi Santoso, S.Sos, Kepala Satuan Intelijen dan Kemanan, pada tanggal 16 September 2016

anak. Salah satu kelebihan surat kabar ialah mampu memberi informasi yang lengkap, bisa dibawa kemana-mana, terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. Surat kabar dapat dibedakan atas periode terbit, ukuran, dan sifat penerbitannya.

Dari segi periode terbit ada surat kabar harian dan ada surat kabar mingguan. Surat kabar harian ialah surat kabar yang terbit setiap hari baik dalam bentuk edisi pagi maupun edisi sore, sementara surat kabar mingguan ialah surat kabar yang terbit paling sedikit satu kali dalam seminggu. Dari segi ukurannya, ada yang terbit dalam bentuk plano dan ada pula yang terbit dalam bentuk tabloid atau majalah. Sementara itu, isinya dapat dibedakan atas dua macam, yakni surat kabar yang bersifat umum yang isinya terdiri atas berbagai macam informasi untuk masyarakat umum (menyeluruh), sedangkan surat kabar yang bersifat khusus, isinya memiliki ciri khas tertentu dan memiliki pembaca tertentu pula, misalnya surat kabar untuk pedesaan, surat kabar untuk wanita, dan semacamnya⁷¹.

Baliho dan spanduk merupakan media yang banyak digunakan oleh lembaga/organisasi untuk menyampaikan pesannya. Pesan yang biasanya dimuat pada baliho dan spanduk lebih terarah dan juga pada tulisannya memiliki warna sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya. Berhubungan dengan hal ini Satintelkam Polesta Palembang menyampaikan pesannya bekerja sama

⁷¹ Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 141

dengan berbagai media cetak antara lain dan beberapa contoh penyuluhan dengan media spanduk dan baliho sebagai berikut:

No	Nama Media
1	Sriwijaya Post
2	Tribarata News
3	Palembang Post

Tabel 1. Daftar media cetak Satintelkam Polresta Palembang⁷²



⁷² Sumber Humas Polresta Palembang, pada tanggal 9 September 2016

Gambar 2. Contoh media cetak baliho dan spanduk

b. Media Elektronik (Online)

Media elektronik merupakan alat yang digunakan dalam peyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (masyarakat). Media elektronik ini banyak digunakan pada lembaga/organisasi baik dibidang Hukum, Niaga ataupun Jasa. Media elektronik memiliki karakteristik antara lain;

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
2. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
3. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio televisi dan semacamnya.
4. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa⁷³.

Adapun media elektronik yang digunakan oleh Satintelkam Polresta Palembang dalam menyampaikan pesannya, antara lain:

⁷³ *Op.Cit*; Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc

a) Radio

Salah satu kelebihan radio dibanding dengan media lainnya ialah cepat dan mudah dibawa kemana-mana. Radio bisa dinikmati sambil mengerjakan pekerjaan lain, seperti menulis, menjahit dan sebagainya. Hasil penelitian membuktikan bahwa para remaja di Amerika Serikat rata-rata lebih banyak waktunya untuk mendengarkan radio dibanding menonton TV.

Ini dibuktikan dengan makin banyaknya stasiun radio yang didirikan di Amerika disamping dengan pertumbuhan stasiun TV. Kecanggihan media radio lebih hebat lagi ketika transistor ditemukan pada 1949 oleh William Shockley. Sesudah itu radio makin mendapat tempat dihati pendengarnya, bukan saja sebagai sumber informasi yang cepat, tetapi juga sebagai alat hiburan yang mudah dibawa kemana saja, baik itu dikantor, dipesawat, dikereta dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini Satlantas Polresta Palembang bekerjasama dengan berbagai media radio yang ada di Kota Palembang baik radio negeri maupun swasta, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Radio
1	RRI (87.6 Fm, 88.4 Fm)
2	Sriwijaya (92.4 Fm)

Tabel 2. Daftar nama radio yang bekerjasama dengan Satintelkam Polresta Palembang⁷⁴

b) Internet

Internet merupakan media yang berbasis komputer. Salah satu keuntungan bagi suatu lembaga dalam menyiarkan informasinya dengan internet adalah karena internet dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik lokal maupun interlokal, baik tua maupun muda. Terlebih lagi sekarang ini telah diciptakan handphone-handphone canggih berbasis komputer (android), sehingga lebih mempermudah lagi masyarakat untuk mengkonsumsi informasi dan berita-berita penting. Kelebihan jaringan komunikasi internet ini adalah kecepatan mengirim dan memperoleh informasi, dan sekaligus sebagai penyedia data yang *shopisticated*.

Sebab 30 tahun lalu orang tidak bisa membayangkan bahwa komputer yang berbasis internet akan menjadi perpustakaan dunia yang dapat diakses melalui satu pintu yang namanya *world wide word* (www). Internet juga menjadi penyedia media informasi surat kabar (*electronic newspaper*), program film, TV, buku baru, kamus, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Satintelkam Polresta Palembang juga menggunakan media internet ini dalam penyampaian pesannya. Menggunakan media internet sebagai alat penyampaian pesannya dirasa cukup efektif bagi Satintelkam Polresta Palembang melihat perkembangan masyarakat Kota Palembang yang

⁷⁴ Sumber Humas Polresta Palembang, pada tanggal 9 September 2016

sekarang ini hampir seluruh masyarakat bisa mengakses internet dan memiliki smartphone sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah dibaca. Adapun link online atau *website* yang dimiliki Satintelkam Polresta Palembang, antara lain:

<http://sakabhayangkarapolrestapalembang.co.id/>,

<https://www.polri.go.id/>, <http://facebook-PolrestaPalembang.com>

c) Media Kelompok (Seminar)

Pada aktivitas komunikasi yang melibatkan lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan salah satunya adalah media kelompok (seminar). Seminar merupakan media komunikasi kelompok yang biasa dihadiri oleh khalayak tidak lebih dari 250 orang. Tujuannya, ialah membicarakan suatu masalah/topik dengan menampilkan pembicara, kemudian meminta pendapat atau tanggapan dari peserta seminar yang biasanya dari kalangan pakar sebagai narasumber dan pemerhati dalam bidang itu. Seminar biasanya membicarakan topik-topik tertentu yang hangat dipermasalahkan oleh masyarakat. Berhubungan dengan hal ini biasanya Satintelkam Polresta Palembang menggelar seminar di berbagai perguruan tinggi

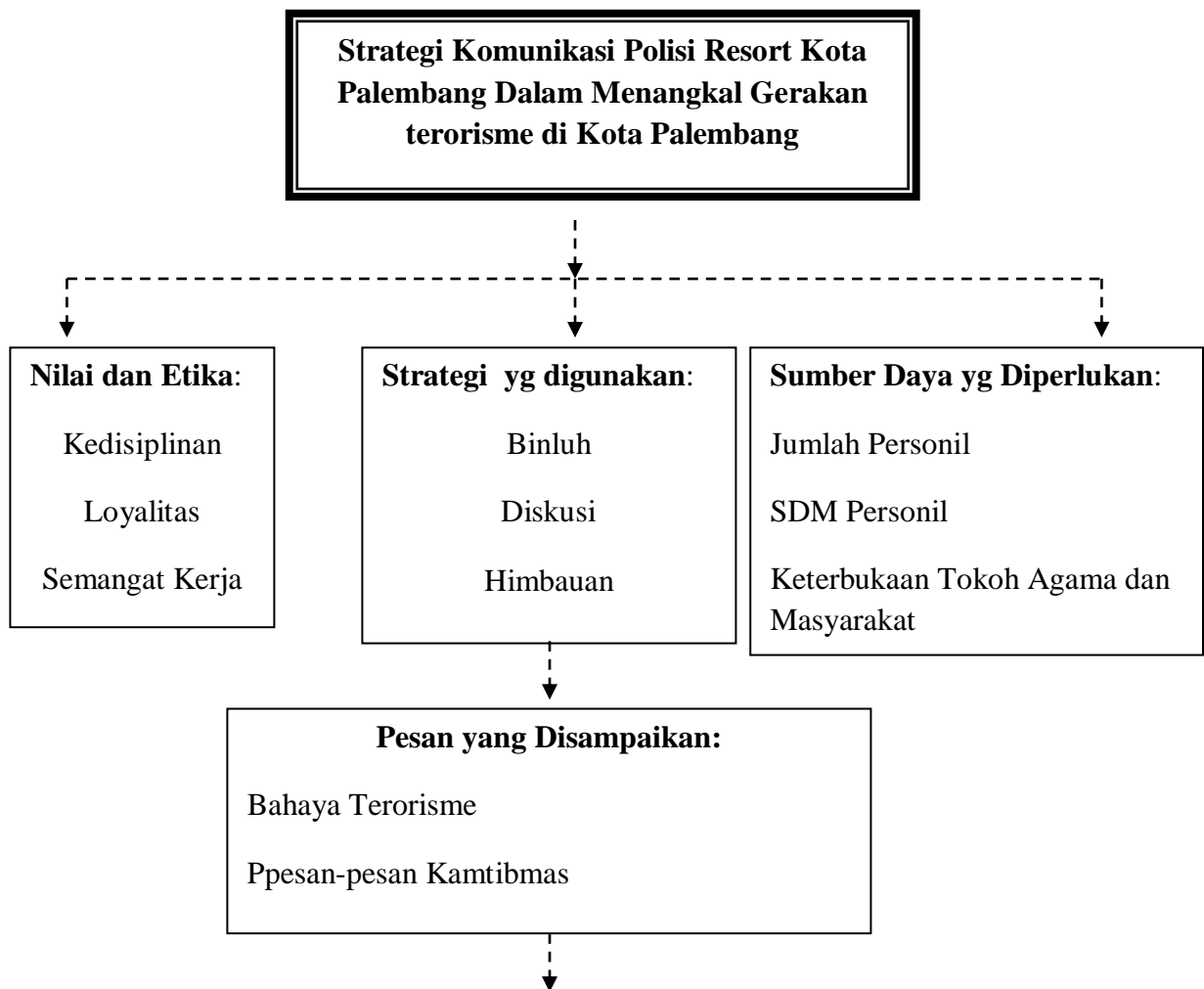
Dengan demikian, dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu proses komunikasi terkhusus dalam suatu lembaga/organisasi apalagi lembaga Kepolisian yang sangat menjunjung tinggi moral dan etika dalam berperilaku. Penting sekali menanamkan suatu nilai-nilai dan etika. Hal ini tentunya sebagai prinsip untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan atau melakukan kegiatan komunikasi baik dalam lingkup lembaga/organisasi (internal) maupun dengan masyarakat (eksternal). Karena sebagai aparat Kepolisian yang setiap harinya bertugas dan selalu berhadapan dengan masyarakat, pastinya akan dipandang masyarakat mengenai kinerja dan tindakannya. Apabila pola tindakannya tidak mencerminkan akhlak yang baik maka masyarakat akan berfikir buruk sehingga akan menimbulkan opini negatif, dan tentu saja akan berimbas pada Lembaganya.

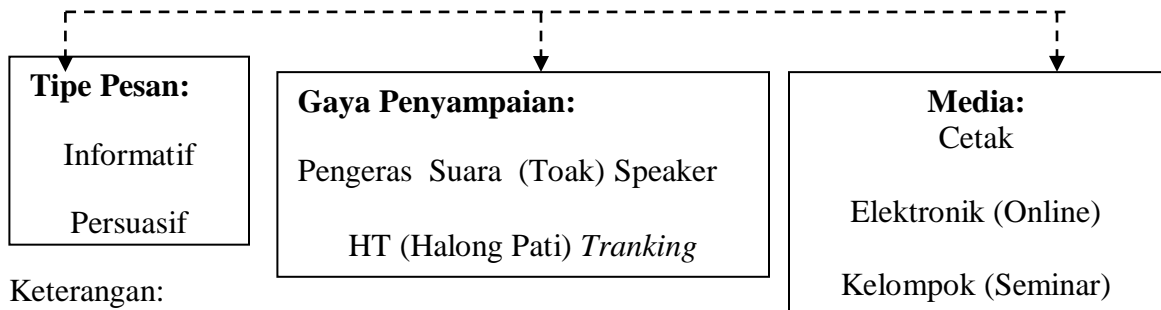
Setelah mengetahui nilai dan etika yang dipegang teguh pada Polresta Palembang. Satintelkam Polresta Palembang memiliki strategi yang efektif dalam melakukan proses komunikasinya. Untuk menerapkan pelaksanaan strategi tersebut tentu akan dipelukannya sumber daya. Karena dengan adanya sumber daya yang mendukung, maka suatu kegiatan akan berjalan lancar. Adanya sumber daya merupakan hal penting dalam suatu kegiatan karena salah satu faktor penentu keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan komunikasi ialah sumber daya yang lengkap.

Setelah menentukan strategi dan sumber daya kini giliran pelaksanaan komunikasinya. Dengan mempertimbangkan berbagai unsur. Salah satunya dengan media, Satintelkam Polresta Palembang menggunakan berbagai media dalam

penyampaian informasinya, mulai dari media secara langsung (seminar), penyuluhan maupun tidak langsung (media internet), selain mengadakan seminar. Pihak Satlantas Polresta Palembang juga menyampaikan pesannya melalui mobile dengan menggunakan kendaraan operasional menyiarkan pesannya melalui pengeras suara. Selain itu juga, mereka para Polisi satuan intelijen dan keamanan turun langsung kelapangan untuk memonitor masyarakat yang ada di kota Palembang. Apabila didapati melakukan hal-hal yang mencurigakan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan konkret sehingga diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang damai dan aman.

Untuk memberikan gambaran tentang Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Dalam menangkal Gerakan terorisme di Kota Palembang peneliti membuatnya menjadi struktur atau bagan dibawah ini, sebagai berikut:





Struktur/skema yang ada diatas, peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang. Yang kemudian peneliti rangkum, sehingga dapat membentuk Struktur seperti diatas.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa berhasilnya Satintelkam Polresta Palembang dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat berikut penuturan dari kedua masyarakat, berdasarkan penuturan dari Bpk. Sugeng Iriyanto pegawai swasta, yang beralamat di jalan Rambutan:

“maksudnya polisi Intel, yang berpakaian bebas itu ya, menurut saya, polisi jaman sekarang nih sudah canggih mereka bebas berkeliaran tanpa ada seorangpun yang tau kalau mereka yang patroli itu adalah seorang polisi atau intel, mereka memantau pun dengan sangat rapih bahkan kita saat mereka memantau daerah-daerah tertentu kita sulit membedakan mana yang preman mana yang intel, sejauh yang saya tahu intel polres ini sudah lumayan bagus kinerja mereka bergerak pun sesuai prosedur yang ada ”.⁷⁵

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudara Fahriadi Pohan yang merupakan pekerja di salah satu perusahaan swasta yang bertempat tinggal di jalan may. salim batubara, sekip tengah, kec. Kemuning. Ia mengatakan bahwa:

⁷⁵ Sugeng Iriyanto, Pegawai Swasta, *Wawancara*, pada tanggal 1 Oktober 2016

“banyak sih intel yang sifat baik tidak arogan tapi ada juga yang arogan, terus sengkalah kalo uji wong Palembang tapi sedikit yang seperti itu. Kalo saya dek jujur ya, belum mencerminkan masyarakat yang taat hukum, karena simple sebenarnya bagaimana kito rakyat atau masyarakat biaso ini nak taat hokum wong kepolisian bae terkadang idak taat bahkan ada yang melanggar hukum sendiri⁷⁶

Pendapat terakhir disampaikan oleh Agus Suherman Tanjung sebagai mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Palembang yang bertempat di jln Rawa Jaya 1, mengatakan bahwa:

“kalo dilihat sudah lumayan baiklah, cukup bagus kinerja polisi sekarang ini. Yah kita lihat sejauh ini bahwa kota Palembang sangat sedikit sekali terdengar tentang penangkapan terorisme yah ini tidak lain dari hasil kerja mereka melalui penyuluhan-penyuluhan dan seminar-seminar sih setau saya seperti.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas jelaslah bahwa dalam menyampaikan pesannya pihak Satintelkam Polresta Palembang, memang telah berupaya keras melakukan berbagai cara untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme. Dan dari berbagai pendapat narasumber diatas, aparat polisi khususnya intelkam, sudah benar-benar bekerja untuk melakukan pencegahan terhadap terorisme. Terlepas dari semua itu, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan sebagian besar masyarakat telah banyak yang taat hukum. Hanya saja sebagian kecil masyarakat yang bandel, kurang memahami dan menerapkan informasi-informasi dan pesan yang telah disampaikan oleh Satintelkam Polresta Palembang.

⁷⁶ Fahriadi Pohan, Pegawai Negeri, Wawancara, pada tanggal 2 Oktober 2016

⁷⁷ Agus Suherman Tanjung, Mahasiswa, *Wawancara* pada tanggal 2 Oktober 2016

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang

1. Faktor Pendukung Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang.

Bagi suatu lembaga/organisasi khususnya Satintelkam Polresta Palembang dalam pelaksanaan kegiatan komunikasinya terkait dengan menangkal gerakan terorisme sudah tentu akan mengalami kelancaran dan hambatan dalam proses komunikasinya. Berdasarkan hal ini yang menjadi faktor pendukung Strategi Komunikasi nya ialah Sumber Daya yang memadai, sebagaimana yang disampaikan Aiptu Febrianto bahwa:

“faktor pendukungnya pada proses kegiatan komunikasi ini ya faktor pendukung internalnya jumlah personil, SDM personil, yang mempunyai kemampuan kinerja yang lebih baik, baik dilapangan maupun di internal kita, kemudian untuk eksternal adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian dalam hal ini dengan pihak keamanan terus adanya sinergis antara pihak kepolisian dengan alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, terus yang saat ini lebih penting lagi adalah keterbukaan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.”⁷⁸

Sebagaimana yang diutarakan dalam wawancara diatas bahwa sumber daya memang merupakan hal penting bagi suatu organisasi/lembaga dalam kegiatan komunikasinya. Bagi Satintelkam Polresta Palembang sumber daya merupakan salah satu hal penentu

⁷⁸ Aiptu Febrianto, PS KBO Intelkam Polresta, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017

dalam pelaksanaan kegiatan komunikasinya. Karena sumber daya yang ada dan lengkap akan memperlancar suatu kegiatan khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya nya terorisme jika ada di kota Palembang.

2. Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang?

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara peneliti, yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan komunikasi Satlantas Polresta Palembang ialah:

“faktor penghambat saat ini yang lebih menonjol adalah dari alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat karena menutup diri dalam memberikan informasi diajak kerja sama, padahal kita hanya memberikan himbuan untuk melakukan pencegahan, namun mereka merasa untuk dicurigai sebagai keterlibatan terorisme ataupun isis, namun terus kita kembangkan, kita berikan pemahaman-pemahaman bahwa kegiatan kita ini semata-mata untuk ketertiban dan keamanan kita bersama”.⁷⁹

Selain itu pendapat terakhir juga disampaikan oleh Intel yang bertugas di lapangan, , menyatakan:

“melihat situasi perkembangan kondisi saat ini, yang menjadi kesulitan kami atau hambatan dari segi faktor manusianya, pengetahuan dan

⁷⁹ *Ibid*, Aiptu Febrianto, PS KBO Intelkam Polresta, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017

kesadaran manusia yang rendah yang bisa menyebabkan banyaknya tumbuh bibit-bibit paham radikal yang berujung pada terorisme”.⁸⁰

Perlu diketahui bahwa seorang komunikator harus tahu dan memahami bahwa komunikasi (sasarannya) adalah salah satu penentu berhasil atau tidaknya suatu proses dari kegiatan komunikasi. Dalam hal ini yang paling utama penghambat komunikasi Satintelkam Polresta Palembang ialah komunikasi sebagai penerima pesan, sebagian komunikasi menganggap sepele mengenai bahaya terorisme yang di sampaikan oleh komunikator yakni Satintelkam Polresta Palembang. Padahal yang sebenarnya pesan tersebut sangat penting bagi kondisi keamanan dan kenyamanan kota Palembang. Maka dari itu, pihak Satintelkam Polresta Palembang dalam hal ini dituntut untuk memaksimalkan lagi upaya-upaya kegiatan komunikasi terkait dengan pencegahan gerakan terorisme kepada masyarakat. Sehingga gerakan terorisme di kota Palembang dapat diminimalisir.

⁸⁰ Hakim, Polisi Satuan Intelkam, *Wawancara*, pada tanggal 31 Maret 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang ” maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan di Kota Palembang
 - a. Pengetahuan situasional menyangkut nilai dan etika yang ditanamkan pada Satintelkam Polresta Kota Palembang sebagian besar para individu

telah diterapkan dan berpegang teguh pada nilai dan etika tersebut dalam menjalankan tugasnya.

- b. Penentuan tujuan dengan menentukan strategi meliputi Binluh, Dikmas, dan Himbauan tentang bahaya terorisme. Serta sumber daya yang ada yakni Jumlah Personil, SDM Personil, Keterbukaan Tokoh Agama dan Masyarakat, dan hasil wawancara kepada masyarakat.
- c. Kompetensi komunikasi, kemampuan pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang dalam mengelolah pesan dan informasi yang akan disampaikan dengan memilih tipe pesan, media dan gaya penyampaiannya dikatakan sangat tepat dan telah berjalan baik dan lancar.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Komunikasi Dalam Menangkal Gerakan Terorisme

- a. Faktor pendukung Strategi Komunikasi ialah jumlah personil, SDM personil, yang mempunyai kemampuan kinerja yang lebih baik, baik dilapangan maupun di internal, kemudian untuk eksternal adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian dalam hal ini dengan pihak keamanan dan terus adanya sinergis antara pihak kepolisian dengan alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan saat ini

yang lebih penting lagi adalah keterbukaan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.

- b. Faktor penghambat Strategi Komunikasi ialah ‘manusia’ sebagai penerima informasi/pesan yang terkadang terjadi salah pengertian, alim ulama tersebut terlalu menutup diri, dan komunikan tersebut merasa dicurigai sebagai bagian dari terorisme.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memiliki masukan saran kepada pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberi kontribusi dalam mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemikiran dalam bidang komunikasi pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Dakwah dan komunikasi Jurusan KPI.
2. Dapat membantu memberikan solusi sebagai bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian skripsi.

3. Hendaknya pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang terus memaksimalkan lagi pesan-pesan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya terorisme kalau bisa penyuluhan tersebut diadakan dan disampaikan 2 kali dalam satu bulan kepada seluruh kalangan masyarakat tidak hanya kepada pegawai, mahasiswa dan pelajar saja.
4. Sebaiknya pihak Satintelkam Polresta Kota Palembang harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, jangan bersifat arogan dan militeristis kepada masyarakat. Agar dapat selalu menjaga citra Polri dengan baik.
5. Sedangkan masukan untuk saya sendiri sebagai peneliti ialah dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 1994. *Strategi Komunikasi, sebuah pengantar ringkas*, Bandung: Armico
- Roudhonah, 2007. *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: UIN Jakarta Press
- Uchjana, Onong. 2008. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Asshiddiqie, 2009. *Perlu Antiterorisme Tak Hanya Untuk Umat Islam*, Jakarta: Salemba
- Syaifullah Fatah, Eep. 2003. *Mengenang Perpu Anti Terorisme*, Jakarta: Rajawali
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia* Jakarta: Percetakan Negara RI
- Wahid, Abdul dan kawan-kawan. 2005. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* Bandung: PT. Refika Aditama
- H. Hendropriyono A, 2009. *Terorisme Fundamentalists Kristen, Hindu, Islam* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Rahmat, Jalaluddin, 2003. *Psikologi komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Evelin, Lili, 2003. *Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kebijakan dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Mulyana, Dedy, 2002. *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Mintzberg, H & Quinn, 1991. *the strategy; process, concept, contents*, second edition, New Jersey: Prentice hall, Inc
- Thoha, Zainal Arifin, Aku Menulis Maka Aku Ada, Kutub, Yogyakarta, 2005*
- Koencoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1973

- Purnomo, Setiawan Hari, 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hunger, David dan Thomas L. Wheelen, 2003. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi
- Changara, Hafied, 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muhammad, Arni, 2009. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, H.A.W, 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka
- Uchjana, Onong Effendy, 2007. *Ilmu Komunikasi Terori dan praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murtopo, Ali, 1978. *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies-CSIS
- David, Fred, 2002. *Manajemen Strategi konsep*, Jakarta: Prehalindo
- Siagian, Sondang. P, 1994. *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Struktur Organisasi*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hadari, Nawawi, 2005. *Manajemen Strategik; Organisasi Non Profit Bidang*
- PB, Triton, 2008. *Marketing Strategic; Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing*, Yogyakarta: Tugu Publisier
- Mftahuddin, M, 2001. *Perencanaan Strategis Sebagai Organisasi Sosial*. Terjemah :Jhon M Bryson, *Strategik Planning For Public And Nonprofit Organizations; A Guide Strengthening An Sustaining Organizational Achievent*. Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Loqman, Loebby, 1990. *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia

Adji, Indriyanto Seno, 2001. *Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates

Kusumah, Mulyana W, 2002. *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia*, FISIP UI, vol 2 no III

Solahudin, 2011. *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu

ICG, 2002. *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia,*” *Indonesia Briefing*, Jakarta/Brussels: International Crisis Group

Wahyu, Saronto y, Karwita Jasir, 2001. *Intelijen teori, aplikasi dan modernisasi*, Jakarta: Ekalaya Saputra

Website:

<http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html> (diakses pada tanggal 23Februari 2016)

[http:// home~att.net/~Nikols/strategi defenition](http://home~att.net/~Nikols/strategi_defenition). (diakses pada tanggal 27 Februari 2016)

<http://kbbi.web.id/tentang-pengawasan> (diakses pada tanggal Mei 26 2016)

www.answer.com/system, (16 Mei 2007)

<https://voa-islamnews.com/bnpt-ciri-teroris-puritan-dan-gemar-mengkafirkan-orang-lain.html>

Koalisi Internasional”, <<http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>

<http://www.meteck.org/causesTerrorism.html>-

Hilmar .Farid, “Perang Melawan Teroris”,

<http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_09010/05.html

Humas.polri.go.id

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Khairil Anwar Simatupang
NIM : 10510019
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang
Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang**

No	DAFTAR PERBAIKAN
1	Abstrak
2	EYD
3	BAB I
4	BAB II

Palembang, 27 Mei 2017

PENGUJI I

Dr. Achmad Syarifudin, MA
NIP. 197311102000031003

PENGUJI II

Muslimin. M. Kom. I
NIP. 1605051 591

PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI

Hal : Permohonan Penjilidan Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan Pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Khairil Anwar Simatupang

NIM : 10510019

Jurusan/Fakultas : Komunikasi Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang.**

Sudah disetujui untuk dijilid. Demikianlah perihal ini kami buat dengan sebenarnya, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Mei 2017

Penguji I

Penguji II

Dr. Achmad Syarifudin, MA
NIP. 197311102000031003

Muslimin. M. Kom. I
NIP. 1605051 591

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Khairil Anwar Simatupang

NIM : 10510019

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/KPI Konsentrasi Humas (PR)

Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang dalam Menangkal Gerakan Terorism di Kota Palembang**

Pembimbing I : **Dra. Hamidah, M.Ag**

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Khairil Anwar Simatupang

NIM : 10510019

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/KPI Konsentrasi Humas (PR)

Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang dalam Menangkal Gerakan Terorism di Kota Palembang**

Pembimbing II : Mohd. Aji Isnaini, M.A

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

RESPONDEN WAWANCARA

Polisi Resort Kota Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Status :

Bahwasanya memang benar sebagai responden wawancara dalam penelitian skripsi saudara:

Nama : **Khairil Anwar Simatupang**

Nim : **10510019**

Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang**

Dalam Menangkal Gerakan Terorisme Di Kota Palembang.

Demikianlah surat ini dibuat sebagai bukti wawancara dan dibuat dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Hormat Saya;

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Khairil Anwar Simatupang
Alamat : Jl. Diponegoro Baru No.245 Palembang
NIM : 10510019
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Simodong Sumatera Utara 14 Januari 1992
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No Telp : 0852-7377-3911

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmadi Simatupang
Ibu : Masdalena Lubis (Almarhumah)
Alamat Orang Tua : Desa Simodong Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 1 Simodong
- MTs Podok Pesantren Ar Riyadh 13 Ulu Palembang
- SMA Muhammadiyah 2 Palembang

Riwayat Organisasi

- Ketua Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2008-2009
- Anggota PMII
- Wakil Ketua KOORDA Fokusmaker Sumsel
Ketua Legislasi Senat Mahasiswa Institut (IAIN) Periode 2012-2013
- PMII (2013)
- Ketua UKMK LPTQ & D Periode 2013
- Laskar Ulul Albab (2013- sekarang)
- Presiden Mahasiswa IAIN RD PLG Periode 2014-2015
- Ketua Bidang Organisasi PW IPNU SUMSEL (2017- Sekarang)

Hormat Saya,

Khairil Anwar Simatupang